

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN
MAŞLAHAH MASYARAKAT LOKAL SEKITAR WISATA
TAMAN BUAH MANGUNAN IMOGIRI BANTUL**

*The Role Of Government In The Economic Empowerment Of The
Community In The Achievement Of Local Community Maşlahah
Around The Fruit Garden Tour Mangunan Imogiri Bantul*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

ZULHIJJAĦ QURROTU AINI

14423125

PEMBIMBING:

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

Yogyakarta, 19 Rajab 1439 H
5 April 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor:3464/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 9 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Zulhijjah Qurrotu Aini

Nomor/Pokok NIMKO : 14423125

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi/Konsentrasi: Ekonomi Islam/Keuangan dan Perbankan Syari'ah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN MAŞLAHAH
MASYARAKAT LOKAL SEKITAR WISATA TAMAN BUAH MANGUNAN
IMOGIRI BANTUL

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Rahmani Timorita Y., M. Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 April 2018
Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Peningkatan Mashlahah Masyarakat Lokal sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul
Disusun oleh : ZULHIJJAH QUR'ROTU A'INI
Nomor Mahasiswa : 14423125

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Siti Achiria, SE, MM (.....
Penguji I : Soya Sobaya, SEI, MM (.....
Penguji II : Tulasmi, SE, MEI (.....
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....



Yogyakarta, 9 April 2018

Dekan

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhijjah Qurrotu Aini
Nim : 14423125
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pencapaian Masalah Masyarakat Lokal Sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 5 April 2018 M

METERAI
TEMPEL
9BCFCAFF009573183
6000
RIBURUPIAH
Qurrotu Aini)

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Zulhijjah Qurrotu Aini

Nomor Mahasiswa : 14423125

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pencapaian Masalah Masyarakat Lokal Sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 April 2018 M



Dr. Rahmani Timorita Y., M. Ag

Halaman Persembahan

Kupersembahkan karyaku ini untuk orang-orang yang tersayang

Kupersembahkan karya kecil ini kepada Mama, Papa, Kak Runi, dan Fadhil yang telah memberikan segala doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bahagia karena kusadar selama ini belum bisa menjadi seperti yang kalian inginkan.

Terima Kasih Mama, Terima Kasih Papa, Terima Kasih Kak Runi, Terima Kasih Fadhil. I Will Always Love You All.

Motto

إِجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُنْ غَافِلًا فَنَدَامَةُ الْعُقْبِ لِمَنْ يَتَكَاَسَلْ

(Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan dan janganlah pula menjadi lalai, karena sesungguhnya penyesalahan itu adalah bagi orang-orang yang malas)

جَرِّبْ وَلَا حِظٌّ تَكُنْ عَارِفًا

(Cobalah dan perhatikanlah niscaya kamu akan mengetahuinya)

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN MAŞLAHAH MASYARAKAT LOKAL SEKITAR WISATA TAMAN BUAH MANGUNAN IMOGIRI BANTUL

Zulhijjah Qurrotu Aini

14423125

Semakin berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang mulai sadar terhadap keadaan disekitar mereka, mereka ingin melakukan suatu perubahan namun terkendala dengan kurangnya bantuan, bantuan yang mereka butuhkan adalah bantuan dari pemerintah guna memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar, dengan pemberdayaan inilah masyarakat dikemudian hari bisa menjadi mandiri dan dapat mengembangkan desanya menjadi lebih baik, serta dengan pemberdayaan ini akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat serta meningkatkan masalah dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di sekitar Taman Buah Mangunan. Sehingga dengan begitu masyarakat dapat diberdayakan dan memperoleh kesejahteraannya. Metode yang digunakan adalah metode wawancara kepada para pedagang yang berjualan di sekitar Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta yang pemerintah lakukan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat masih kurang, terbukti dengan kurangnya pemantauan serta pengelolaan dari pemerintah kepada para pedagang di Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul. Serta dapat diketahui bahwa pencapaian mashlahat bagi masyarakat sekitar Taman Buah Mangunan memang sudah terpenuhi, namun itu semua adalah inisiatif dari para warga sekitar Mangunan dan tidak sepenuhnya disebabkan karena adanya peran serta pemerintah.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Masalah, Kesejahteraan*

ABSTRACT

The Role Of Government In The Economic Empowerment Of The Community In The Achievement Of Local Community Maṣlahah Around The Fruit Garden Tour Mangunan Imogiri Bantul

Zulhijjah Qurrotu Aini

14423125

Increasingly, many people are becoming aware of the situation around them, they want to make a change but are constrained by the lack of assistance, the assistance they need is the help from the government to empower the local people's economy, with this empowerment society can become independent and can be develop the village for the better, and with this empowerment will improve the welfare for the community. This study aims to determine how the role of government in empowering the community and improve municipal and welfare for the people who are around the Fruit Park Mangunan. So that the community can be empowered and get their welfare. The method used is the method of interviewing to the traders who sell around the Park Fruit Mangunan Imogiri Bantul. And the results show that the participation of the government to do in empowering the economy of society is still lacking, as evidenced by the lack of monitoring and management of the government to the traders in the Fruit Park Mangunan Imogiri Bantul. And it can be seen that the achievement of mashlahat for the people around the Garden of Mangunan Fruit was already fulfilled, but it is all the initiatives of the residents around Mangunan and not entirely due to the role of government.

Keywords: Government Role, Economic Community Empowerment, Maṣlahah, Welfare

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional

Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’ marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda,

dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَاعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إَ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
أُ ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-atfāl	
	-	raudatul atfāl	
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah	al-
		Munawwarah	
	-	al-Madīnatul-	
		Munawwarah	
طَلْحَة	-	talhah	

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نُؤْمِنُ - nu''ima
الْبِرِّ - al-birr	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	القَلَمُ - al-
الرجُل	qalamu
as-sayyidu	البَدِيءُ - al-badī'u
السَّيِّدُ	
as-syamsu	الْجَلَالُ - al-jalālu
الشَّمْسُ	

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تاخُذُونَ ta'khuḏūna	إِن inna
النَّوْءُ an-nau'	أُمُورُتْ - umirtu
شيئٌ syai'un	أَكَلْ akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Wa auf al-kaila wal mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Ibrāhīm al-Khalīl
وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ibrāhīm al-Khalīl
	Bismillāhi majrehā wa mursahā
	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a
ilaihi sabīla
Walillāhi 'alan-
nāsi hijjul-baiti
manistatā'a
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī
بِكَ مُبَارَكًا bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-
الْقُرْآنُ Qur'ānu
Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil
Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ Nasrun minallāhi wa fathun
قَرِيبٌ qarīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا
سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ
بِالْحَقِّ بِشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ يَازُنُهُ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi-nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Sebagai sebagian dari pesyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN MAŞLAHAH MASYARAKAT LOKAL SEKITAR WISATA TAMAN BUAH MANGUNAN IMOGIRI BANTUL”

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun

non-materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya sebagai penulis skripsi ini menghaturkan rasa terimakasih kepada :

Pada kesempatan ini peneliti ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharram, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka membimbing penyelesaian penelitian ini.
4. Orang tua saya yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Suyadi, selaku koodinator dari komunitas pedagang di Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.
6. Kak Runi, Walid, Khifdi, Septi, Uus, Intan, Aulia, Arizka, Evita, Rindy, Dhea, Lulu, Sintia, Nuni, Nadia, Hanni, Richi, Lutfi, dan Risnu yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu berkat doa dan dukungannya sekali lagi terimakasih.

Selayaknya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penulis pun menyadari jika baik penulisan skripsi ini ataupun selama proses pembelajaran di kampus tercinta ini mungkin belum sempurna harapan pihak terkait, teman-teman, ataupun masyarakat, tetapi apapun yang menjadi hasilnya, inilah hal yang paling optimal yang bisa penulis persembahkan guna menjadi generasi penerus bangsa sesuai yang diharapkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang

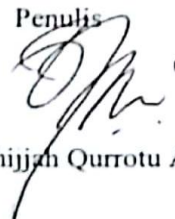
mungkin belum sesempurna harapan pihak terkait, teman-teman, ataupun masyarakat, tetapi apapun yang menjadi hasilnya, inilah hal yang paling optimal yang bisa penulis persembahkan guna menjadi generasi penerus bangsa sesuai yang diharapkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang sudah penulis berikan dapat menjadi manfaat yang sangat berarti untuk seluruh pihak. Amin Ya Rabb.

Billahitaufiq Walhidayah

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 April 2018

Penulis



[Zulhijjah Qurrotu Aini]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka	7
B. Landasan Teori.....	16
1. Teori Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam	16
2. Teori Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam.....	26
3. Teori Maşlahah.....	36
4. Wisata Taman Buah	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	46
D. Objek Penelitian	47
E. Populasi dan Sampel	47
F. Sumber Data.....	47

G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul	51
B. Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul	53
C. Pencapaian Mashlahat Bagi Masyarakat Sekitar Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul Sebelum dan Sesudah Adanya Bantuan Dari Pemerintah.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.2 Indikator Pengukuran Keberdayaan Ekonomi Masyarakat yang memadukan konsep Robert Chambers dan Gordon-Kikuchi.....	20
Tabel 4.1 Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.....	64
Tabel 4.2 Pendapatan Rata-Rata Per bulan Para Pedagang.....	69
Tabel 4.3 Pencapaian Masalah Masyarakat Mangunan Sebelum dan Sesudah Memperoleh Bantuan dari Pemerintah.....	76
Tabel 4.4 Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Bantuan Pemerintah..	81
Tabel 4.5 Perbandingan Pendapatan Pedagang Setelah Memperoleh Bantuan Pemerintah dengan UMR Bantul.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Teori.....	45
Gambar 3.1 Skema Teknik Analisis Komponensial	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika masyarakat Indonesia yang mana cenderung selalu mengikuti segala perkembangan yang ada, sehingga mereka tidak akan tertinggal oleh perkembangan yang terjadi. Masyarakat akan senantiasa mencari dan menggali segala hal yang bersangkutan dengan perubahan yang ada pada suatu tempat atau daerah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dalam demografi, sosialisasi, kultural. Namun terdapat pula salah satu perubahan yang akan senantiasa diikuti pula oleh masyarakat, yaitu perubahan serta perkembangan dalam tempat wisata.

Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia, merupakan salah satu negara dengan berbagai destinasi wisata yang menarik, mulai dari Daerah Sabang, hingga Daerah Merauke yang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bahkan tak hanya warga Indonesia yang berkunjung, melainkan para turis juga banyak yang berkunjung, hal ini dikarenakan pesona Indonesia yang terkesan indah dan menarik. Banyak masyarakat yang selalu mencari tahu lokasi wisata yang menarik yang bisa untuk dituju.

Salah satu daerah dengan berbagai destinasi wisata yang menarik adalah di Yogyakarta, tak dapat dipungkiri bahwa Yogyakarta merupakan daerah yang banyak dikunjungi wisatawan, hal ini dikarenakan Yogyakarta merupakan destinasi wisata yang menarik, dengan berbagai inovasi yang selalu dikembangkan didalamnya. Wisatawan akan selalu dikejutkan dengan berbagai hal yang tidak dapat mereka jumpai ditempat lainnya.

Jika berbicara tentang wisata di Yogyakarta, maka salah satu destinasi yang selalu di tuju adalah daerah Imogiri, Bantul salah satunya yaitu Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul. Karena disanalah mereka dapat merasakan berbagai panorama alam yang berbeda dari tiap sudut yang berbeda. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, serta sebagai daerah wisata yang berada dibawah Dinas Pertanian Bantul, maka memberikan tugas bagi pemerintah

untuk senantiasa mengelola tempat tersebut serta dapat memberikan inovasi yang berbeda setiap waktunya.

Peran pemerintah dikatakan penting karena pemerintahlah yang memegang peranan penting dalam pengembangan suatu daerah, tidak hanya masyarakat yang membangun daerah tersebut tetapi pemerintah juga perlu untuk membantu pengembangan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jaelani menjelaskan bahwa memberdayakan ekonomi umat, berarti mengembangkan sistem ekonomi umat yang mana ditujukan untuk kepentingan umat. Hal ini juga berarti perlunya peningkatan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya (Jaelani, 2014).

Pengaliran sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian akan terciptanya kesejahteraan bagi dan kemakmuran bagi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya yaitu memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi adalah peran pemerintah yang belum maksimal dalam upaya untuk memberdayakan ekonomi bagi masyarakat dari segi pengembangan potensinya. Meskipun sudah ada masyarakat yang berjualan disekitar taman buah mangunan, namun hal tersebut masih terbatas pada bagian kuliner saja, belum adanya pengembangan potensi dari sisi kreatifitas masyarakatnya. Jika melihat penjelasan sebelumnya bahwa pemerintah perlu untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada dimasyarakat untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat tersebut. Namun dalam penelitian ini

peran pemerintah belum maksimal dalam memberdayakan ekonomi bagi masyarakatnya.

Pemberdayaan ekonomi dikatakan penting karena dengan pemberdayaan tersebut akan terciptanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat pada daerah tersebut.

Seperti yang telah diketahui, bahwasanya masalah adalah memelihara tujuan syariat, serta meraih manfaat dan menghindari kemudharatan. Maka dengan begitu masalah ini sejatinya akan menciptakan pula kesejahteraan bagi masyarakat. Masalah pula memiliki kaitan dengan tujuan syariat seperti definisi diatas, dimana tujuan syariat ini berhubungan dengan lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.

Adanya para pedagang di Wisata Taman Buah Mangunan yang memperoleh lahan dari pemerintah secara gratis sebagai cara pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, namun masih terdapat beberapa hal yang kurang dalam peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Mangunan tersebut.

Dengan fenomena yang terjadi tersebut, maka kita dapat membandingkan peningkatan masalah yang diperoleh oleh para pedagang tersebut. Adakah perbandingan masalah yang diperoleh pedagang sebelum dan sesudah pemberian bantuan dana dari pemerintah.

Sehingga dalam hal ini penyusun akan meneliti terkait perolehan masalah bagi masyarakat sekitar Wisata Taman Buah Mangunan setelah adanya bantuan dana dari pemerintah dalam mengembangkan spot wisata disana, dengan judul “PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN MASLAHAH MASYARAKAT LOKAL SEKITAR WISATA TAMAN BUAH MANGUNAN IMOIRI BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

Sebagai suatu lokasi wisata yang selalu dikunjungi oleh wisatawan, serta sebagai daerah wisata yang berada dibawah Dinas Pertanian Bantul, maka menjadi salah satu tugas bagi pemerintah untuk senantiasa mengembangkan wisata tersebut menjadi semakin menarik terlebih dalam hal *view* atau *spot* yang akan digunakan oleh para wisatawan untuk mengambil gambar. Karena yang menjadi acuan utama wisatawan untuk berkunjung adalah *view-view* yang menarik serta inovatif. Maka dari itu pemerintah senantiasa mengembangkan daerah wisatanya menjadi lebih menarik. Dengan bantuan dalam pengembangan wisata yang diberikan pemerintah untuk mengembangkan wisata ini akan menjadikan wisatawan senantiasa berkunjung ke sana. Dengan begitu pula pendapatan masyarakat sekitar yang membuka usaha disekitar tempat wisata tersebut juga bisa meningkat. Maka dari itu dalam hal ini masalah yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat kita bandingkan antara sebelum adanya bantuan pengembangan dari pemerintah dengan sesudah adanya bantuan pengembangan dari pemerintah. Sehingga dalam hal ini dapat dirumuskan permasalahan menjadi 2, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana pencapaian masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul sebelum dan sesudah menerima bantuan pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat serta para pedagang yang berjualan disekitar wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.
2. Pencapaian masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar Mangunan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam peningkatan masalah bagi masyarakat lokal sekitar tempat wisata. Dengan adanya peran pemerintah ini, dalam Ekonomi Islam akan diketahui pemberdayaan perekonomian masyarakatnya, serta peningkatan kesejahteraan serta pencapaian masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar wisata Taman Buah Mangunan.

2. Manfaat Praktisi:

Dengan adanya penelitian ini:

- a. Pemerintah dapat mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan agar dapat memberdayakan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik,
- b. Masyarakat dan juga para pedagang sekitar wisata Taman Buah Mangunan, mereka dapat mengetahui pencapaian masalah yang dialami setelah memperoleh bantuan dari pemerintah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penilitian dan menjadikan penilitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dalam Bab I berupa Pendahuluan, didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Dalam Bab II yang merupakan landasan teori, memaparkan tentang bahan yang melandasi tulisan ini yaitu berupa telaah pustaka dan juga landasan teori. Pada Bab III yang merupakan metode penelitian, didalamnya membahas tentang desain dari penelitian, lokasi penelitian, waktu

yang dilaksanakan dalam penelitian, objek dari penelitian tersebut, teknik dalam pengumpulan data dan yang terakhir adalah teknik dalam analisis data.

Pada Bab IV yang merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan, menjelaskan tentang deskripsi dari objek yang diteliti serta penjelasan mengenai hasil obesrvasi dan wawancara dan juga interpretasi dari hasil tersebut yang kemudian dihubungkan dengan teori yang sudah ada. Dan pada Bab V yang merupakan kesimpulan dan saran menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini, serta saran yang hendak disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan terkait penelitian saya ini. Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang masalah, serta peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Abbas mengatakan dalam Jurnalnya yang berjudul “*Maṣlahah dan Batasan-batasannya menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawâbith al-Maṣlahah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah)*” bahwa menurut Al-Buthi, maṣlahah adalah sesuatu yang bermanfaat, namun manfaat ini memiliki hubungan dengan maqāṣid syariah (Arfan, 2013). Abbas mengatakan bahwa dalam Kitab Dlawâbith al-Maṣlahah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah berisi 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan hubungan antara maṣlahah dengan syariat islam, dimana dalam hal ini membahas dalil Al-Qur’an dan Sunnah yang mendukung maṣlahah. Bagian kedua menjelaskan bahwa maṣlahah itu memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan. Kemudian untuk bagian ketiga meneliti pengungkapan maṣlahah mursalah mulai dari masa para nabi (Arfan, 2013).

Abbas mengatakan bahwa Al-Buthi ini menerima bahwa maṣlahah mursalah adalah sebagai salah satu maṣlahah yang bisa dipergunakan sebagai sumber hukum ketika tidak ditemukannya sumber didalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, namun maṣlahah tersebut dapat dikatakan sebagai sumber hukum jika maṣlahah ini memenuhi kriteria-kriteria antara lain; termasuk ke dalam kategori syariah, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan lain yang lebih tinggi (Arfan, 2013).

Abbas juga menjelaskan bahwa diakhir bab pada buku Al-Buthi ini menekankan bahwa kelima kriteria yang sudah dijelaskan diatas harus memiliki konsekuensi yaitu, (a) tidak boleh mentakhshiskan, menafsirkan atau

menta'qidkan sesuatu dari Al-Qur'an atau Sunnah (b) pendapat sebagian ulama yang meletakkan sebuah kaidah terkenal, yaitu “*tatabaddal al-ahkâm bi tabaddul al-azmân*” (perubahan hukum sebab perubahan zaman) itu tidak boleh diambil secara lahiriyah saja (c) untuk para ulama yang telah mampu berijtihad dan membahas beberapa permasalahan hukum Islam untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memahami karakteristik masalah (Arfan, 2013).

Pada jurnal yang dibahas Abbas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Perbedaannya adalah, penjelasan tentang masalah lebih mencondong pada pemenuhan *maqâsid syariahnya*, sedangkan dalam penelitian penyusun, masalah yang akan penyusun teliti adalah perbandingan dari masalah sebelum diberikan bantuan dari pemerintah, dengan masalah setelah diberikan bantuan dari pemerintah, sehingga yang akan diukur adalah tingkat kesejahteraan sosialnya.

Jurnal yang ditulis oleh Imron Rosyadi yang berjudul “*Pemikiran Syatibi tentang Masalah Mursalah*” menjelaskan bahwa menurut Syatibi Masalah dapat dikategorikan menjadi 2 makna, yaitu makna *haqiqi* dan makna *majazi*. Jika dalam makna *haqiqi* masalah diartikan jika dalam perbuatan manusia itu memberikan manfaat, sedangkan untuk masalah dengan makna *majazi* bahwa adanya kepastian manusia untuk memperoleh manfaat dari apa yang telah dilakukannya.

(Rosyadi, 2013) juga menjelaskan bahwa Ahmad Ar-Raisuni dalam bukunya *Nazariyah al-Maqâsid ‘inda al-Imâm asy-Syâtibî* berusaha untuk menjelaskan bahwa makna masalah ini adalah mendatangkan manfaat dan menghindari *kemudharatan*. Imron juga menjelaskan bahwa dalam kitabnya Syatibi *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* Syatibi menjelaskan bahwa Masalah Mursalah adalah sesuatu yang sejalan dengan tindakan syariat. Sehingga dari keseluruhan pemikiran syatibi ini dapat diambil kesimpulan bahwa masalah ini dapat dijadikan sebagai penetapan hukum namun didasarkan dengan beberapa syarat pertama, kemashlahatan yang dijadikan sebagai dasar dalam dalil masalah

mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak di-capai oleh syara yang kedua, masalah yang dijadikan penetapan dalam pertimbangan hukum harus termasuk logis dan yang ketiga masalah yang dijadikan penetapan hukum haruslah masalah *dharuriyat* dan *hajiyyat* dan yang keempat bahwa masalah tersebut harus menyempurnakan suatu kehidupan, dan dapat menghilangkan kesulitan (Rosyadi, 2013).

Jurnal yang ditulis oleh Johari dengan judul "*Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam(Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam)*", (Johari, 2013) menjelaskan bahwa dalam masalah ini Izzudin Ibn Abdi Salam lebih menekankan masalah pada makna haqiqi dan makna majazinya, dimana dalam penjelasannya akan membahas tentang masalah dan mafsadah seperti pemaparan dari Syatibi. (Johari, 2013) juga menjelaskan bahwa Izzudin Ibn Abdi Salam mengatakan bahwa setiap perintah dan larangan syariat, pada dasarnya akan mewujudkan tujuan syariat, yang mana tujuan tersebut adalah menarik kemashlahatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi *جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ* yang mana berdasarkan pada kaidah ini yang akan mengkaji pula tentang maqasidnya.

(Johari, 2013) menjelaskan bahwa Izzudin Ibn Abdi Salam memaparkan bahwasanya terdapat dua hal yang harus dianalisis yaitu dari segi masalah dan segi mafsadahnya. Jika definisi masalah hampir sama dengan definisi yang diungkapkan oleh Syatibi. Jika melihat pada konsep masalah dan mafsadah ini Johari menjelaskan bahwa Izzudin Ibn Abdi Salam membedakan tingkatan amal dalam beberapa kategori yang didasarkan pada kemashlahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya yaitu (a) sesuatu yang disyariatkan (b) pembagian amal menjadi wajib, sunnah, ibahah, haram dan makruh, serta yang fardhu dibedakan menjadi *fardlu 'ain* dan *fardlu kifayah* (c) pembedaan dosa dalam dosa besar dan kecil (d) perbedaan keutamaan antara dunia dan akhirat.

Membahas tentang masalah, ternyata memiliki ruang lingkup tersendiri yang dijelaskan oleh Izzudin Ibn Abdi Salam yang dijelaskan oleh Johari bahwa lingkup dari maqasid adalah adanya Hak Allah, serta Hak Hamba Allah, sehingga Izzudin Ibn Abdi Salam menyusun urutannya berdasarkan prioritasnya, (a) mendahulukan Hak Allah atas hak yang lainnya manakala sulit dikompromikan (b) kalau terjadi kesamaan dengan Hak Allah, maka disuruh untuk memilih (c) mendahulukan hak-hak hambanya atas hak lainnya manakala sulit dikompromikan (Johari, 2013).

Pada jurnal dua diatas yang membahas tentang masalah dalam pemikiran dari Syatibi serta Izzudin yang mencakup pendefinisian masalah yang dibedakan menjadi 2 yaitu masalah *haqiqi* serta masalah *majazi*, namun yang penyusun bahas disini masalah yang timbul setelah adanya peran pemerintah yang membantu perkembangan fasilitas wisata diwilayah tersebut sehingga terdapat perbedaan antara penelitian penyusun dengan penelitian Imron serta Johari.

Jurnal Martini Dwi Pusparini yang berjudul “*Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)*”. (Pusparini, 2015) menjelaskan bahwa Islam sebagai sistem hidup menjanjikan keteraturan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi manusia yang meyakiniya. (Pusparini, 2015) menjelaskan bahwa pandangan Ghazali dalam menjelaskan kesejahteraan, menurut Ghazali kesejahteraan sosial adalah sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.

Martini juga menjelaskan bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang mencakup 5 aspek, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Dalam jurnal ini, Martini menjelaskan bahwa masalah ini termasuk konsep yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam jurnal ini juga dipaparkan bahwa pemikiran Syatibi mengelaborasi pemikiran Ghazali yang mana poin utamanya adalah berusaha menetapkan tujuan hidup manusia, segala hal yang mendukung terwujudnya tujuan ini disebut dengan *mashalih*, sedangkan yang tidak mendukungnya disebut *mafasid*.

(Pusparini, 2015) diakhir menutup dengan penjelasan bahwasanya sebenarnya konsep kesejahteraan dalam Islam ini disebut dengan Maṣlahah.

Pada jurnal yang dipaparkan oleh Martini ini memang menjelaskan tentang konsep kesejahteraan sosial dengan perspektif Maqasid Syariahnya, namun penelitian saya membahas tentang maṣlahah yang berujung pada kesejahteraan sosial tetapi disertai juga dengan pembahasan tentang konsep pemberdayaan masyarakat dalam islam sehingga dengan pemberdayaan tersebut akan menimbulkan maṣlahah dan kesejahteraan bagi umatnya.

Jurnal yang ditulis oleh Aris Munandar dengan judul *“Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat”* berusaha untuk mengeksplorasi pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada era reformasi, dimana keseluruhan masyarakat memiliki akses yang sama dalam segala bidang baik ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Dengan begitu pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan dengan asas keadilan (Munandar, 2008).

Dari jurnal diatas, terdapat hal yang membedakan dengan penelitian penyusun, jika penelitian penyusun ini membahas pemberdayaan masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu pedagang sekitar wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul, sehingga pemberdayaan masyarakatnya relatif lebih kecil dibandingkan pemberdayaan dalam jurnal Aris yang lingkupnya adalah seluruh masyarakat di Indonesia.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Ravik Karsidi dengan judul *“Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat”* berusaha menguraikan terkait perkembangan penyuluhan pembangunan masyarakat sipil, sehingga dengannya dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk memperbaiki mutu kehidupannya. Serta dalam penulisan ini juga berupaya untuk menjelaskan terkait peran penyuluhan untuk dapat menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat yang layak, sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat (Karsidi, 2001).

Dari penelitian yang ditulis oleh Ravik ini, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yaitu dari segi pembangunannya. Jika dalam penelitian penyusun, pembangunan yang dimaksud lebih kepada pembangunan untuk lokasi wisata, sehingga masyarakat lebih mengerti bagaimana untuk dapat mengelola lokasi wisata itu dengan baik, sehingga akan terus dikunjungi oleh para wisatawan.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh I Ketut Alit yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Propinsi Bali*” memaparkan bahwasanya dalam lingkungan yang kumuh pada daerah tersebut diperlukan peran pemerintah untuk senantiasa memberikan program-program yang dilakukan untuk mengelola lingkungan tersebut sehingga menjadi lingkungan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga dalam program ini diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dari lingkungan tersebut. Namun permasalahannya banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan mereka sehingga dengan begitu masyarakat dapat melakukan pemberdayaan secara mandiri (Ketut, 2005).

Dari penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, jika penelitian dari I Ketut ini membahas lebih spesifik pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat dalam lingkungan kumuh yang berada di Bali, namun penelitian penyusun ini difokuskan pada lingkungan yang tidak kumuh dan dilokasinya adalah di Kota Yogyakarta serta difokuskan pada pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat senantiasa mengembangkan usaha yang mereka buka di sekitar lokasi wisata Mangunan.

Penelitian berikutnya yang ditulis oleh Ginandjar Kartasasmita dengan Judul “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*” menjelaskan bahwa menurut penulis munculnya ekonomi rakyat disebabkan adanya kesenjangan sosial ekonomi dari masyarakat, dengan adanya

kesenjangan ini, menciptakan keinginan bagi masyarakat untuk dapat berperan lebih pada kegiatan perekonomian. Maka dari itu diperlukan salah satu pendekatan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik, pendekatannya adalah dengan melakukan pemberdayaan untuk masyarakat. Karena dengan pemberdayaan ini masyarakat dapat mengembangkan diri serta menciptakan kemajuan bagi mereka (Kartasasmita, 1995).

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, jika dalam penelitian penyusun tidak membahas adanya kesenjangan sosial dan ekonomi diri masyarakat. Penelitian ini juga ditujukan untuk memberdayakan pedagang sekitar wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul, sehingga dalam hal ini lingkup dari pemberdayaannya adalah lebih sempit dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh Ginandjar.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan
1	Abbas Arfan	de jure Jurnal Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 87- 96 1977),	Maşlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi'	Persamaan dari penelitian ini membahas tentang maşlahah. Dan perbedaannya adalah maşlahah yang akan penulis teliti adalah perbandingan pencapaian maşlahah sebelum adanya bantuan dari pemerintah dan setelah adanya bantuan dari pemerintah.

2	Imron Rosyadi	PROFETIKA Jurnal Studi Islam Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89	Pemikiran Syatibi tentang Maṣlahah Mursalah	Persamaan dari penelitian ini adalah penjealasan tentang maṣlahah. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah maṣlahah yang timbul setelah adanya peran pemerintah yang membantu perkembangan fasilitas wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.
3	Johari	Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013	Konsep Maṣlahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang maṣlahah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yang dibahas lebih terfokuskan pada maṣlahah yang timbul setelah adanya peran pemerintah yang membantu perkembangan

				fasilitas wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.
4	Martini Dwi Pusparini	La Riba Volume 1, Nomor 1, Juni 2015	Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang konsep kesejahteraan sosial dengan pespektif Maqasid Syariahnya, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah masalah yang penulis bahas tidak hanya tentang kesejahteraan sosial, melainkan adanya konsep pemberdayaan masyarakat dalam islam.
5	Aris Munandar	Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008	Peran Negara dalam penguatan program pemberdayaan masyarakat	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang peran negara dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu

				pemberdayaan masyarakat dalam lingkup yang kecil yaitu pedagang sekitar wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.
6	Ravik Karsidi	MEDIATOR, Vol. 2 No.1 2001	Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pembangunan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah lebih difokuskan kepada pembangunan untuk lokasi wisata.
7	I Ketut Alit	JURNAL PERMUKIMAN NATAH VOL. 3 NO.1 PEBRUARI 2005 : 1 – 61	Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Propinsi Bali	Persamaan dari penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah difokuskan pada lingkungan wisata yang tidak kumuh serta adanya fokus dalam pemberdayaan masyarakat.

8	Ginandjar Kartasasmita	BESTARI, Agustus-Desember 1995	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat	Persamaan dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah tidak membahas tentang adanya kesenjangan sosial dan ekonomi dari masyarakat, serta ditujukan untuk pedagang sekitar wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.
---	------------------------	--------------------------------	--	--

B. Landasan Teori

1. Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Islam

a. Definisi Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memperoleh awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Sehingga pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Makna pemberdayaan untuk pemerintah adalah usaha mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan tujuan untuk

meningkatkan ukuran –ukuran fisik dan non-fisik dalam kehidupan bermasyarakat.

(Kurnia, 2015, p. 39) menjelaskan bahwa Payne dalam Maharani (2012) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia untuk memperoleh daya, kekuatan serta kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan manusia tersebut.

(Kurnia, 2015, p. 39) menjelaskan bahwa terdapat pernyataan dari Suharto (2010) yang sesuai dengan pernyataan Kartasasmita (1997) bahwa inti dari pemberdayaan adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri, yang dalam hal ini memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera. Sejahtera secara lahir berarti mendapatkan kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia, sebagai contoh, terpenuhinya kebutuhan pangan, dan sandang, mendapatkan pendidikan dasar yang memadai, dan kesehatan. Sejahtera secara batin adalah menjadi bahagia, dihormati, dan dihargai, bebas dari rasa takut, serta bebas dari ancaman, dan bebas untuk mengemukakan pendapat, dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

b. Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah adanya perubahan masyarakat menjadi lebih baik, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Maka akan adanya peningkatan dalam kemampuan serta peningkatan dari segi kemandirian ekonomi. Dalam hal ini pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan adanya peran aktif dan kreatif dari masyarakat (Basith, 2012, p. 27).

Cohen dan Up-Hoff (1990) menjelaskan bahwa peran dari masyarakat adalah dengan senantiasa terlibat dalam pembuatan keputusan, penerapan dari keputusan tersebut, dan menikmati hasil dan evaluasi dari keputusan tersebut. Dengan adanya peran dari masyarakat akan menciptakan kesadaran terhadap situasi dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, serta dapat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Basith, 2012, p. 28).

Chamber (1993) menjelaskan bahwa indikator dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan adanya *self-reliant* (kemandirian), *self-confident* (rasa percaya diri), *self-respecting* (pengakuan diri). Sehingga Supriatna(2000) menyatakan bahwa indikator yang dijelaskan oleh Chamber termasuk ke dalam nilai, dimana nilai ini yang menjadi dasar dalam pembentukan masyarakat dalam memandang lingkungan serta dapat memberikan kekuatan dan rasa aman bagi masyarakat tersebut. Nilai inilah nanti yang akan menjadi pemandu dalam membandingkan, menilai, dan memutuskan suatu tindakan masyarakat (Basith, 2012, p. 31).

Berbeda sedikit dengan Chamber, Gordon dan Kikuchi yang dikutip oleh Supriatna (2000) mengatakan bahwa indikator suatu masyarakat terberdaya dalam ekonominya adalah dengan *benevolence* (pengabdian), *independence* (kemandirian), *support* (dukungan), *recognition* (pengakuan), *leadership* (kepemimpinan), *Conformity* (kesesuaian) (Basith, 2012, p. 32).

Sehingga dari penjelasan diatas Supriatna (2000) dan Riyadi Soepratna (2000) memadukan indikator keberdayaan ekonomi masyarakat yang dijelaskan oleh Chamber dengan Gordon dan Kikuchi dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Indikator Pengukuran Keberdayaan Ekonomi Masyarakat yang memadukan konsep Robert Chambers dan Gordon-Kikuchi

No.	Chambers	Gordon dan Kikuchi
1.	Self-Respect	Benevolence
2.	Self-Reliant & Self Confidence	Independence
3.	Self-Confidence & Self-Respect	Support
4.	Self-Respect & Self-Confidence	Recognition
5.	Self- Respect, Self-Confidence, Self-Reliant	Leadership
6.	Self-Respect, Self-Confidence, Self-Reliant	Conformity

Sumber: (Basith, 2012, p. 32)

Sehingga dengan tercapainya indikator diatas, maka menurut Shley Montagu dan Floyd Matson (dalam Supriatna, 2000) akan terciptanya *The Good Community* dan *The Good Competency*. Dimana *The Good Community* ini memiliki sembilan nilai yaitu: masyarakat yang dapat saling berinteraksi dengan sesama, masyarakat memiliki hak dan kemampuan untuk mengurus kepentingan secara bertanggung jawab, masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan, perolehan kekuasaan yang merata, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi untuk kepentingan bersama, suatu komunitas yang dapat memberikan makna bagi anggotanya, adanya beragam pendapat yang berbeda-beda, pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat, adanya manajemen konflik yang dapat menyelesaikan suatu konflik yang terjadi (Basith, 2012, p. 33).

Sedangkan untuk *The Good Competency* adalah adanya nilai-nilai dalam berupa, masyarakat yang dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas, dapat memperoleh tujuan yang diinginkan sesuai dengan skala prioritas yang telah dibuat, dapat memperoleh dan menyetujui cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat (Basith, 2012, p. 33).

Dalam Islam, pemberdayaan ekonomi perlu untuk diperbaiki, dikarenakan adanya ketimpangan dalam hal sosial ekonomi, dimana yang kaya selalu memperbudak yang miskin. Kurangnya keadilan dalam kehidupan masyarakat inilah yang perlu untuk diluruskan kembali. Usaha untuk memperbaikinya dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu dengan perbaikan akidahnya, dan yang kedua dengan penataan struktur masyarakat dengan menetapkan adanya peraturan berupa syariat-syariat agama yang melandasinya. Sehingga dengan begitu masyarakat akan memiliki dasar untuk menjaga moral, *akhlaq al-karimah*, dan juga dapat menghadapi permasalahan dalam perubahan masyarakat (Asy'arie, 1997, p. 126).

c. Dasar dan Tujuan

Pada pemberdayaan masyarakat dalam Islam, terdapat dasar yang melandasinya yaitu pada Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat

dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa

Serta terdapat dasar yang ditulis dalam Hadist dibawah ini:

“Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selagi hamba itu mau me-nolong saudaranya” (H.R. Muslim).

Dari seluruh penjelasan diatas, terdapat satu tujuan yang akan dicapai yaitu untuk menciptakan keseimbangan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa tertindas dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga dapat dijelaskan pula bahwa tujuan dari adanya pemberdayaan adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. (Kurnia, 2015, p. 40) menjelaskan bahwa Indati (2010) menyampaikan bahwa kebutuhan manusia secara umum yaitu kebutuhan dasar, psikis, sosial, dan spiritual.

Dalam kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk kebutuhan psikis meliputi kebutuhan keberfungsian mental seperti memori, pembelajaran dan intelegensi, kapasitas penyesuaian, dan kepribadian. Kebutuhan sosial meliputi kebutuhan pengakuan keberadaan individu dalam keberadaan dengan sesama. Kebutuhan spiritual meliputi kebutuhan akan falsafah hidup, kedamaian hidup, makna hidup, tujuan hidup dan semangat hidup.

d. Ruang Lingkup Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh beberapa elemen seperti, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau organisasi masyarakat lokal itu sendiri. Elemen pemerintah merupakan derajat yang paling tinggi dan memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan elemen-elemen yang lainnya. Sehingga pemberdayaan akan menjadi lebih kuat apabila dari awal dibangun dengan unsur saling percaya dan menghormati. Dalam konteks pemberdayaan segalanya elemen bersifat setara, dan dari setiap elemen tersebut harus saling memahami serta menghargai kepentingan maupun perbedaan yang ada antar elemen (Eko, 2004, p. 257).

Dalam pemberdayaan tidak ada kata-kata bahwa elemen yang kuat menguasai elemen yang lemah. Elemen yang kuat ini bekerja sebagai fasilitator atau pendamping yang mana dapat memudahkan elemen yang lemah untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri. Pada dasarnya pihak luar ini hanyalah bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai pembina atau penyuluh. Fasilitator ini adalah pendamping yang akan memudahkan kelompok sosial dalam memberdayakan dirinya. Tugas dari fasilitator dimulai dari analisis masalah, pengorganisasian, fasilitasi, asistensi, dan advokasi kebijakan (Eko, 2004, p. 257).

Dengan adanya pemberdayaan ini mampu menciptakan motivasi serta inspirasi bagi komunitas didalam suatu daerah sehingga dapat berkontribusi secara lebih signifikan. Peran daripada fasilitator adalah melibatkan pula para warga untuk berpartisipasi dalam suatu program, dengan adanya keterlibatan warga dalam suatu program, maka akan tumbuh rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Selain wakil-wakil daripada warga

yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu program, pendamping juga perlu untuk meyakini warga bahwa setiap warga memiliki potensi beragam yang dapat bermanfaat bagi kemajuan bersama. Karena itu diharapkan setiap warga berpartisipasi secara teknis dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Sehingga dengan begitu program akan menjadi milik warga, yang dilaksanakan pula oleh warga, dan akan bermanfaat untuk warga pula (Kurnia, 2015).

Dalam pandangan Islam terkait pemberdayaan ekonomi, bahwa tingkat perekonomian masyarakat akan selalu berhubungan dengan ideologi politik masyarakat dan juga dengan keyakinan agama masyarakat tersebut. Agar permasalahan ekonomi ini tidak semakin melebar, maka diperlukan adanya pendidikan dalam Islam, dalam pendidikan Islam ini akan diberikan pengetahuan terkait pentingnya pembentukan watak dalam wirausaha. Perlu ditekankan dalam pembentukan watak ini, bahwa tujuan utama dalam berwirausaha adalah bukan untuk memperoleh keterampilan saja, melainkan tujuan yang paling utama adalah untuk dapat melihat adanya potensi-potensi ekonomi disekitar masyarakat yang bisa dikembangkan oleh mereka (Asy'arie, 1997, p. 138).

Dalam pemberdayaan ekonomi menurut Islam diperlukan adanya pembelajaran dalam agama disekolah untuk menjelaskan tentang ekonomi dan makna kekayaan menurut Islam. Dan perlu pula untuk ditekankan dalam konteks fiqh bahwa untuk menjadi seseorang yang kaya harus dilakukan dengan cara yang baik dan bermoral. Kekayaan menurut Islam dikatakan penting karena dengan kekayaan itulah dapat menyempurnakan rukun Islam. Serta perlu pula untuk dijelaskan terkait makna dari kefakiran yang mana merupakan janji setan, serta perlu untuk dijelaskan bahwa masyarakat perlu untuk membuat suatu karya dan melihat potensi yang ada disekitar, sehingga masyarakat dapat menjadi

wirausahawa yang memiliki watak yang kuat dan siap untuk menghadapi persaingan ekonomi global (Asy'arie, 1997, p. 139).

Maka adanya pendidikan Islam ini adalah untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa perlunya untuk menjadi kaya, namun tidak perlu untuk memutlakan uang, karena sejatinya uang menurut Islam bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai pelengkap dalam menyempurnakan ibadah seperti zakat dan haji (Asy'arie, 1997, p. 139).

(Asy'arie, 1997, p. 141) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Islam diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan baik oleh pemerintah maupu institusi keagamaan disekitar masyarakat, adapun beberapa pembinaannya yaitu:

1) Pelatihan Usaha

Dari pelatihan ini masyarakat akan memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep dalam kewirausahaan. Dengan begitu akan tercipta motivasi dari masyarakat dan masyarakat juga memperoleh pengetahuan tentang kewirausahaan.

2) Permagangan

Adalah permagangan masyarakat pada perusahaan yang sesuai dengan pilihan masyarakat untuk membuka usaha.

3) Penyusunan Proposal

Dengan melakukan penyusunan proposal ini dapat menciptakan kerja sama dengan beberapa lembaga perekonomian.

4) Permodalan

Permodalan yang berbentuk uang ini merupakan faktor yang penting dalam menjalankan usaha, namun bukan yang paling terpenting. Maka untuk memperoleh modal ini perlu dilakukan hubungan kerja sama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun bantuan dana yang berasal dari kemitraan. Penambahan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan lebih

baik diberikan dalam bentuk modal untuk pengembangan dan bukan dalam bentuk modal awal, hal ini dilakukan untuk mencegah resiko dalam pengembangan usahanya.

5) Pendampingan

Dalam menjalankan usaha, diperlukan adanya tenaga pendamping yang profesional yang mana akan mengarahkan wirausahawan untuk menjalankan usahanya lebih baik. Pendampingan ini diperlukan ketika wirausahawan tidak mampu dalam mengendalikan usaha yang dijalankannya.

6) Jaringan Bisnis

Tahap selanjutnya yaitu pengelompokan wirausahawan sesuai dengan bidang dan potensi yang dijalankan antara satu daerah dengan daerah, sehingga dengan begitu diharapkan dapat menciptakan hubungan bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan bahkan dapat memperluas pasar.

Dalam memberdayakan ekonomi masyarakat tidak cukup dengan penyediaan sarannya agar dapat melatih keterampilan masyarakat. Tetapi yang sangat dibutuhkan adalah usaha untuk dapat menciptakan wawasan dan semangat masyarakat dalam berwirausaha. Semangat dan wawasan ini akan tercipta dengan melakukan penggalian potensi secara sistematis, sehingga dengan begitu masyarakat dapat melihat peluang-peluang dilingkungannya yang dapat dikembangkan (Asy'arie, 1997, p. 152).

2. Teori Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Islam

a. Definisi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Islam

Peran pemerintah adalah suatu peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk yang positif, yang mana memberikan

kemudahan dalam menjalankan suatu kegiatan (Chapra, 2000, p. 61).

Pada pemberdayaan masyarakat yang mana mengacu kepada masyarakat itu sendiri agar dapat berkembang dan menjadi mandiri, diperlukan pula peran serta dari pemerintah untuk dapat mengembangkannya (Kuswata, 1985, p. 34).

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya ditegaskan dalam wahyu, tetapi diperkuat juga dengan hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerja sama. Dari berbagai penjelasan diatas, terbukti bahwa kualitas Negara Islam adalah kecakapan dan kemampuannya untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kekuasaan tidak terletak pada pimpinan negara Islam maupun rakyat, tetapi berada pada Allah sebagai perumus Undang-Undang (legislator) utama (Jindan & Khalid, 1994).

Dalam teori Umer Chapra, peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah diperlukan, karena dengan adanya peran pemerintah inilah yang akan memberikan peran positif dan akan berorientasi sesuai dengan sasaran dalam ekonomi, peran yang dilakukan ini bersifat komplementer yang dilakukan pemerintah dengan internalisasi nilai-nilai islam dalam masyarakat, penciptaan iklim sosio-ekonomi yang sehat, serta adanya pengembangan dalam institusi yang tepat (Chapra, 2000, p. 83).

b. Dasar dan Tujuan

Pada teori yang diberikan oleh Umer Chapra, terdapat satu ayat yang dijadikan sebagai salah satu dasar pada teorinya, ayat tersebut adalah surat Al-Baqoroh ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ٢٥٦

256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk

Inti dari ayat diatas adalah agar peran yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan tujuan-tujuan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat tidak perlu menggunakan cara yang salah dan dilarang. Maka pemerintah haruslah bersikap bijak dalam menerapkan syariat Islam (Chapra, 1999, p. 249).

Tujuan dari peran pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat menurut Islam adalah, untuk menciptakan kesejahteraan atau *maqasid syariah* bagi seluruh masyarakat, dan bukan sekelompok bagian ataupun individual (Chapra, 1999, p. 260). Adapun tujuan ingin dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan perannya agar dapat memperoleh *maqasid syariah* adalah (Chapra, 1999, p. 230):

1) Dapat terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat

Dengan sumber daya alam yang tersedia, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, namun

karena sumber daya alam tersebut terbatas, maka perlulah untuk membatasi pengambilan sumber daya, pengambilan sumber daya dilakukan hanya untuk kebutuhan masyarakat umum dan bukan individual, dan yang lebih diutamakan adalah masyarakat yang miskin.

- 2) Sumber penghasilan yang diperoleh masyarakat merupakan sumber yang halal

Setiap individu dari masyarakat diwajibkan untuk mencari nafkah agar dapat menjamin kehidupan keluarganya, maka setiap dari masyarakat wajib untuk memperoleh peluang yang sama untuk mencari nafkah dengan jujur dan adil. Dan apabila terdapat masyarakat yang tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan keterbatasan fisiknya, maka menjadi tugas pemerintah dan masyarakat untuk membantunya dalam pemenuhan kebutuhannya.

- 3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang adil

Walaupun masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhannya, namun masih terjadi kesenjangan dalam perolehan pendapatan dan kekayaan, dalam Islam, selama kesenjangan itu masih normal dan tidak terlalu berbeda antara satu dengan yang lain, maka hal itu terhitung wajar. Maka perlulah bagi masyarakat yang memiliki penghasilan lebih banyak untuk memberikan kepada masyarakat yang penghasilannya sedikit atau yang membutuhkannya. Karena sejatinya harta yang diperoleh adalah titipan dan ada sebagian yang wajib untuk disedekahkan. Maka perlulah adanya pendistribusian kekayaan yang adil antar masyarakat.

- 4) Dapat menciptakan pertumbuhan dan stabilitas

Agar dapat terealisasinya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka perlunya stabilitas dalam ekonomi dan

pertumbuhan ekonomi yang baik untuk mengurangi kesenjangan yang berlebihan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin.

c. Ruang Lingkup Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam

Agar dapat menciptakan suatu daerah yang maju maka perlu diketahui terlebih dari segi mana suatu daerah tersebut dan bagaimana keadaan dalam suatu daerah tersebut. Agar dapat menciptakan suatu daerah yang maju dapat dibagi menjadi beberapa segi, diantaranya (Kuswata, 1985):

1) Sebagai Suatu Proses

Yaitu merupakan perubahan dari masyarakat yang hidup secara tradisional menjadi lebih maju, dalam segi ini perlu dilakukan perubahan pada sisi sosial dan psikologisnya masyarakatnya.

2) Sebagai Suatu Metode

Suatu upaya agar masyarakat dapat mengembangkan diri mereka sendiri dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki masing-masing.

3) Sebagai Suatu Program

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini maka yang cenderung akan ditekankan adalah dari sisi pendidikan, ketrampilan, kesehatan, industri, koperasi dan lain sebagainya.

4) Sebagai Suatu Gerakan

Agar dapat terciptanya masyarakat yang maju, maka perlulah ditekankan pada kerangka ideologi yang

mendasari dan mengarahkan proses, metode dan suatu program untuk memajukan desa.

Dengan banyaknya permasalahan dalam suatu daerah salah satunya adalah penghasilan dan pendapatan yang terbilang rendah, maka diperlukan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka perlulah manajemen untuk mengatur mengatasi permasalahan tersebut.

Sasaran dalam kemajuan suatu daerah ini ada pada masyarakatnya. Dalam hal ini diperlukan peningkatan kemampuan serta taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan kemajuan suatu daerah ini, dapat mempercepat pula pertumbuhan dan perkembangan dari sosial ekonomi dalam daerah tersebut.

Pada saat ini, untuk dapat memajukan suatu daerah yang cenderung diutamakan adalah pada bidang ekonominya, sehingga segala upaya yang dilakukan lebih mengacu kepada pengembangan ekonominya. Sedangkan untuk bidang-bidang yang lainnya perlu pula untuk dikembangkan namun hanya sebagai penunjang dan pelengkap saja (Kuswata, 1985, p. 41).

Adapun mekanisme dalam mengembangkan suatu daerah adalah dengan adanya proses perpaduan antara kegiatan ataupun program dari pemerintah dalam upaya pengembangan suatu daerah dan kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, maka diperlukannya rasa tanggung jawab dengan perubahan sikap mental, pandangan hidup cara berfikir dan berbuat dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan pengembangan suatu daerah diperlukan adanya koordinasi yang baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat tercapainya manfaat dan tujuan yang diinginkan guna mengembangkan suatu daerah.

Sehingga dalam hal ini Pemerintah sebagai tingkatan paling atas haruslah sigap dan cepat untuk dapat mengembangkan suatu daerah, jangan sampai pemerintah lambat dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan pengembangan suatu daerah. Karena pemerintah juga merupakan aspek yang penting untuk dapat menciptakan pengembangan suatu daerah.

Untuk menciptakan pengembangan dalam suatu desa terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain (Kuswata, 1985):

- 1) Menyediakan dan memperluas lapangan pekerjaan di daerah pedesaan, baik dalam sektor pertanian, industri kecil, kerajinan rakyat, dan usaha kewiraswastaan desa, meningkatkan dan mengembangkan program padat karya dan lain sebagainya.
- 2) Menghidupkan dan menumbuhkan perekonomian desa secara kooperatif menuju kepada usaha-usaha koperasi.
- 3) Memperluas jaringan dan menyempurnakan jaringan prasarana desa yang meliputi prasarana produksi, prasarana perekonomian, prasarana perhubungan dan komunikasi, serta prasarana sosial.
- 4) Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pemugaran-pemugaran perumahan dan lingkungan desa.
- 5) Meningkatkan pengembangan pengetahuan keterampilan masyarakat desa.
- 6) Meningkatkan usaha penyuluhan ke daerah pedesaan melalui berbagai media.
- 7) Memperluas fasilitas kesehatan pedesaan terutama pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi lainnya.

- 8) Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas koperasi unit desa sebagai wadah kegiatan di bidang pembangunan dalam arti para sektor perekonomian desa.
- 9) Mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai wadah kegiatan dibidang pengembangan suatu desa.
- 10) Meningkatkan dan menyempurnakan aparatur pemerintah desa, sehingga mampu melaksanakan fungsinya di desa dengan baik.
- 11) Mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan pembangunan desa yang menyeluruh dan terpadu.
- 12) Mengembangkan dan memperluas pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara meningkatkan peranan wanita secara keseluruhan.

Dengan seluruh langkah diatas, jika menginginkan terciptanya tujuan untuk mengembangkan suatu daerah, maka seluruhnya tergantung pada pelaksanaannya itu sendiri, baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika menginginkan pengembangan suatu daerah maka diperlukan tanggung jawab secara bersama antara pemerintah sebagai tingkatan yang

Dalam penjelasan Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei (2001) dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba untuk menawarkan tiga kompleks pemberdayaan. *Pertama* yaitu pemberdayaan pada mata ruhaniah, dimana seperti yang sudah diketahui bahwa moral dari masyarakat Indonesia sekarang cenderung untuk selalu mengikuti budaya negatif barat. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah. *Kedua* yaitu pemberdayaan intelektual, Indonesia sekarang ini dapat dikatakan

jauh tertinggal dengan negara lain dalam hal kemajuan dan penguasaan IPTEK, maka dari itu diperlukan sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual. *Ketiga* yaitu pemberdayaan ekonomi, harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat islam, khususnya di Indonesia, karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut (Jaelani, 2014).

Peranan yang dilakukan pemerintah adalah dalam hal positif dimana membantu masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keseimbangan antara kepentingan yang bersifat sosial maupun individual. Serta mempertahankan perekonomian didalam lingkungan tersebut agar selalu seimbang, dan mencegah adanya penyelewengan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi (Chapra, 1999, p. 248).

Selain peranan diatas, pemerintah juga perlu untuk melakukan pemberdayaan ekonominya, dalam hal ini lima kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu (Chapra, 1999, p. 268),

- 1) Menghidupkan Faktor Manusia

Perlunya suatu motivasi untuk menciptakan semangat bagi masyarakat dalam mengembangkan lingkungan mereka. Selain dari segi motivasi, masyarakat perlu memiliki kemampuan dan akses pada keuangan untuk menciptakan lingkungan mereka menjadi lebih baik. Dalam motivasi ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya pemahaman tentang kesadaran moral, dimana kesadaran ini perlu dilakukan untuk menghindari pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial.

- 2) Mengurangi Pemusatan Kekayaan

Agar dapat mengurangi pemusatan dalam kekayaan ini, dapat dilakukan dengan pengembangan usaha-usaha mikro di lingkungan tersebut dan desentralisasi pembuatan keputusan.

3) Restrukturisasi Ekonomi

Hal yang dapat dilakukan untuk dapat merestrukturisasi ekonomi adalah dengan memilah pemenuhan kebutuhan hidup antara *need* dan *want*, dan dapat juga dengan memberikan kelebihan harta kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

4) Merestrukturisasi Keuangan

Restrukturisasi keuangan ini perlu dilakukan secara menyeluruh, agar lembaga keuangan dapat memberikan sumbangan dalam hal penghapusan ketidakseimbangan dan terhadap intermediasi yang adil dan efisien dari sumber keuangan tersebut. Agar masyarakat yang kaya tidak semakin menindas yang miskin, maka peran dari lembaga keuangan adalah juga dengan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki usaha untuk memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan tersebut (Muhammad Yunus, 1988). Maka perlulah lembaga keuangan tersebut sesuai dengan sistem Islam, dimana sistemnya Islam ini lebih kondusif dan solutif.

5) Perencanaan Kebijakan Strategis

Untuk menciptakan suatu lingkungan yang terberdaya, perlulah dilakukan perencanaan kebijakan strategis dalam jangka panjang. Dengan adanya rencana ini negara akan melakukan perhitungan yang realistis mengenai sumber daya fisik dan manusia yang tersedia, dan meletakkan sesuai dengan prioritas-prioritasnya. Dengan dilakukannya kebijakan ini, maka memungkinkan pemerintah ataupun

sektor swasta memberikan sumbangan yang besar. Rencana yang perlu dilakukan masyarakat adalah dengan menggunakan sumber daya yang langka dengan efisien dan adil, perlu dilakukan artikulasi nilai-nilai Islam dalam hal tabungan , konsumsi, dan investasi dan etika kerja. Perlu pula dilakukan klasifikasi barang-barang dalam tiga kategori kebutuhan, pertengahan, dan kemewahan. Selain itu perlu pula untuk mengurangi pengangguran dengan cara meningkatkan lapangan usaha bagi masyarakat.

Hal diataslah yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat secara islami, agar menciptakan suasana yang sejahtera dan damai.

3. Teori Maṣlahah

a. Definisi Maṣlahah

Ali Yafie dalam menjelaskan bahwa Maṣlahah adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seorang manusia (Sadat, 2013).

Maṣlahah menurut Buthi dalam (Nawawi, 2010) adalah identik dengan manfaat, yaitu segala sesuatu yang mengandung manfaat baik berupa upaya untuk memperolehnya, seperti mengambil hal-hal yang berfaidah dan mengandung nilai-nilai yang baik, dan meninggalkan segala yang menimbulkan bahaya. Dalam hal ini Buthi dalam (Nawawi, 2010) membagi definisi maṣlahah menjadi dua, yaitu maṣlahah dunia dan maṣlahah akhirat. Hal ini dikarenakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat agama diarahkan untuk menciptakan maṣlahah dunia dan akhirat.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maṣlahah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang

manusia, dimana berhubungan dengan pengambilan manfaat dan menghindari yang menimbulkan *mudharat*.

Buthi dalam (Nawawi, 2010) memberikan lima batasan dalam masalah, hal ini dikarenakan masalah tidak bisa dijadikan dalil tersendiri dalam syariat islam. Adapaun batasan-batasan yang diberikan olehnya adalah, batasan *pertama* masalah harus relevan dengan *maqasid syariah*. Batasan *kedua* masalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, batasan *ketiga* masalah tidak boleh bertentangan dengan Sunnah. Batasan *keempat* masalah tidak boleh bertentangan dengan *qiyas* dan batasan yang *kelima* bahwa masalah tidak boleh bertentangan dengan masalah yang lebih penting atau sama pentingnya.

Ulama Ushul membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu (Zuhri, 2009, p. 104):

- 1) Masalah *dar'ul mafasid* yang mana masalah ini sering disebut dengan masalah *dharuriyat*, maksud dari masalah ini adalah pemenuhan kebutuhan primer, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan membahayakan orang tersebut. Dalam hal ini ada lima hal yang perlu dipelihara, dan sering disebut dengan "*maqasidul khamsah*" yaitu, Agama (dengan mempertahankan aqidah islamiyah), Jiwa (terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan), Akal (larangan minum-minuman keras atau segala hal yang dapat merusak akal), Keturunan (larangan perzinaan), dan Harta (larangan untuk melakukan pencurian maupun mencari harta dengan cara yang haram).
- 2) Masalah *jalbu masalih* dan bias disebut dengan *hajiyaat*, maksudnya adalah pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sekunder, dimana jika hal ini tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan orang tersebut, melainkan akan menimbulkan kesulitan baginya.

- 3) *Tahsiniyat*, adalah kebutuhan yang komplementer bagi manusia, kebutuhan ini hanya sebagian pelengkap dan penyempurna saja, jika tidak dapat dipenuhi tidak akan membahayakan dan menyulitkan manusia.

Konsep masalah akan selalu diakhiri dengan kesejahteraan bagi umatnya, dimana dalam indikator dari pencapaian kesejahteraan adalah dengan pemenuhan *maqasid syariah*. Dimana *maqasid syariah* mengukur tingkat perlindungan dari sisi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga jika kelima aspek ini telah terpenuhi maka akan tercipta kesejahteraan yang berhubungan pula dengan terciptanya masalah (Pusparini, 2015).

(Kurnia, 2015, p. 40) menjelaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesejahteraan. Dengan terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan hidup menunjukkan tercapainya kesejahteraan. Maka sejatinya indikator dikatakannya sejahtera adalah apabila dapat terpenuhinya kebutuhan yang tidak hanya bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kesejahteraan bukan hanya perihal ekonomi saja, melainkan juga perihal sosio-budaya, yang melibatkan nilai-nilai interaksi sosial untuk mencapai kesejahteraan hidup. Maka dari itu, konsep kesejahteraan dirumuskan lebih dari pada definisi dari kemakmuran ataupun kebahagiaan. (Kurnia, 2015, p. 41) menjelaskan bahwa Benny (2013) memaparkan terkait konsep kesejahteraan yang mana tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik individu ataupun keluarga, tetapi kesejahteraan juga merupakan pemenuhan kebutuhan psikologisnya. Sehingga tiga kelompok yang perlu untuk dipenuhi adalah kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, serta kebutuhan pengembangan.

(Kurnia, 2015, p. 41) menyatakan bahwa menurut Ali (2009) kesejahteraan bagi suatu keluarga memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang mana kebutuhan dasarnya belum dapat terpenuhi secara minimal, dalam hal ini dapat berupa kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
- 2) Keluarga Sejahtera Tahap I, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal, namun belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, ruang untuk interaksi keluarga, dan lain sebagainya.
- 3) Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan juga telah memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti halnya kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan mampu memperoleh informasi dari media.
- 4) Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan sosial-psikologisnya, dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat. Seperti memberikan sumbangan untuk kepentingan sosial masyarakat, serta berperan serta dalam lembaga kemasyarakatan ataupun lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya.
- 5) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik

yang bersifat dasar, sosial-psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

(Kurnia, 2015, p. 42) menjelaskan bahwa menurut Sumardjo dalam Maharani (2012), ketika masyarakat sudah sejahtera, maka mereka sudah dapat memahami potensi dirinya, serta mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), mampu mengarahkan dirinya sendiri, memiliki kekuatan untuk berunding, memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dan dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya.

b. Dasar dan Tujuan Maṣlahah

Izzudin Bin Abd Salam didalam kitabnya *Qawa'id Al-ahkam fi Mushalih Al-Anam* dalam (Djazuli, 2007, p. 27) mengatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan syariah adalah maṣlahah, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih maṣlahah. Maṣlahah dan *mafsadah* ada yang untuk kepentingan *ukhrawi* maupun untuk kepentingan duniawi, dan bisa juga untuk kepentingan keduanya.

Kemashlahatan dilihat dari sisi syariah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang wajib untuk dilaksanakan, yang sunnah untuk dilaksanakan, dan yang mubah untuk dilaksanakan (Djazuli, 2007, p. 28). Apabila dalam maṣlahah itu banyak yang harus dilakukan dan dalam waktu yang sama, maka pilihlah yang paling maṣlahah hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 17-18:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى
فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ ١٧ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ ١٨

17. Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku

18. yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal

atau dalam Surat Az-Zumar ayat 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٥

55. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya

Sama halnya apabila menghadapi *mafsadah* pada waktu yang sama, maka dahulukanlah yang paling buruk dari akibat *mafsadah* tersebut. Dan apabila *maṣlahah* dan *mafsadah* itu terjadi dalam waktu yang sama, maka yang diambil adalah *maṣlahah* apabila *maṣlahah* tersebut lebih banyak, namun jika *mafsadah* yang lebih banyak maka yang didahulukan adalah *mafsadahnya*, karena menolak *mafsadah* termasuk dalam *maṣlahah*, hal ini sesuai dengan kaidah:

دَفْعُ الضَّرَارِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemashlahatan”

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak *mafsadah* didahulukan daripada meraih *maṣlahah*”

Tujuan dari masalah adalah untuk menghindari *mafsadah* dan untuk memperoleh masalah serta kesejahteraan. Dan dari tujuan ini memunculkan kaidah seperti dibawah ini:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”

Apabila tujuannya itu wajib, maka segala media atau cara untuk menuju hal tersebut juga menjadi wajib, dan apabila tujuannya itu haram, maka segala media atau cara yang menuju hal tersebut juga haram. Sebagai contoh apabila babi itu haram, maka membuka peternakan babi bagi seorang muslim itu menjadi haram. Dan begitupun sebaliknya, apabila menutup aurat itu wajib, maka membuka sebuah pabrik tekstil untuk membuat kerudung itu menjadi wajib. Dan apabila sholat Jum’at itu wajib, maka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum’at menjadi wajib (Djazuli, 2007, p. 31).

Kemudian untuk mengetahui tingkat baik dan buruknya suatu cara tersebut tergantung dengan tujuannya, seperti kaidah dibawah ini:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib.”

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram, maka hal tersebut juga haram hukumnya.”

4. Wisata Taman Buah

a. Jenis Wisata

(Walangitan et al., 2015) menjelaskan bahwa menurut Ernawati (2010) Pariwisata berkelanjutan adalah suatu industri pariwisata yang memiliki dampak ringan terhadap lingkungan. Dengan adanya pariwisata ini juga dapat menciptakan pendapatan bagi warga, serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Richard dan Hall (2000:1) menjelaskan dalam jurnal (Walangitan et al., 2015) bahwa adanya pariwisata berkelanjutan ini adalah juga untuk menjamin keberlangsungan manfaat ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat dan lingkungannya.

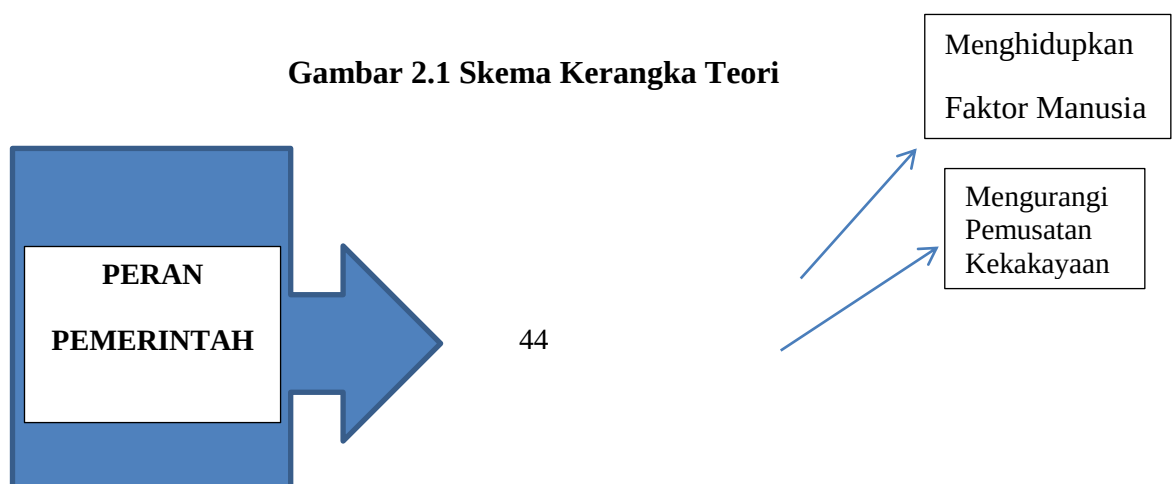
(Walangitan et al., 2015) menjelaskan bahwa (Fandeli dan Mukhlison, 2000:228) menyampaikan bahwa Ekowisata adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan jasa lingkungan, baik itu alam (keindahan dan keunikannya), maupun masyarakat (budayanya, cara hidupnya, struktur sosialnya dengan mengemukakan unsur-unsur konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat setempat). Damanik dan Weber (2006:37-38) menjelaskan dalam jurnal (Walangitan et al., 2015), bahwa ekowisata adalah kegiatan wisata yang menaruh perhatian pada kelestarian sumberdaya pariwisata. Ekowisata ini dapat menjadi solusi untuk pemecahan masalah yang berasal dari wisata massal yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Ekowisata cenderung dijalankan di suatu daerah yang memiliki ciri khas tertentu serta keunikan, serta kekhasan tersendiri, sehingga dapat mempertahankan keaslian dan keutuhan ekosistem.

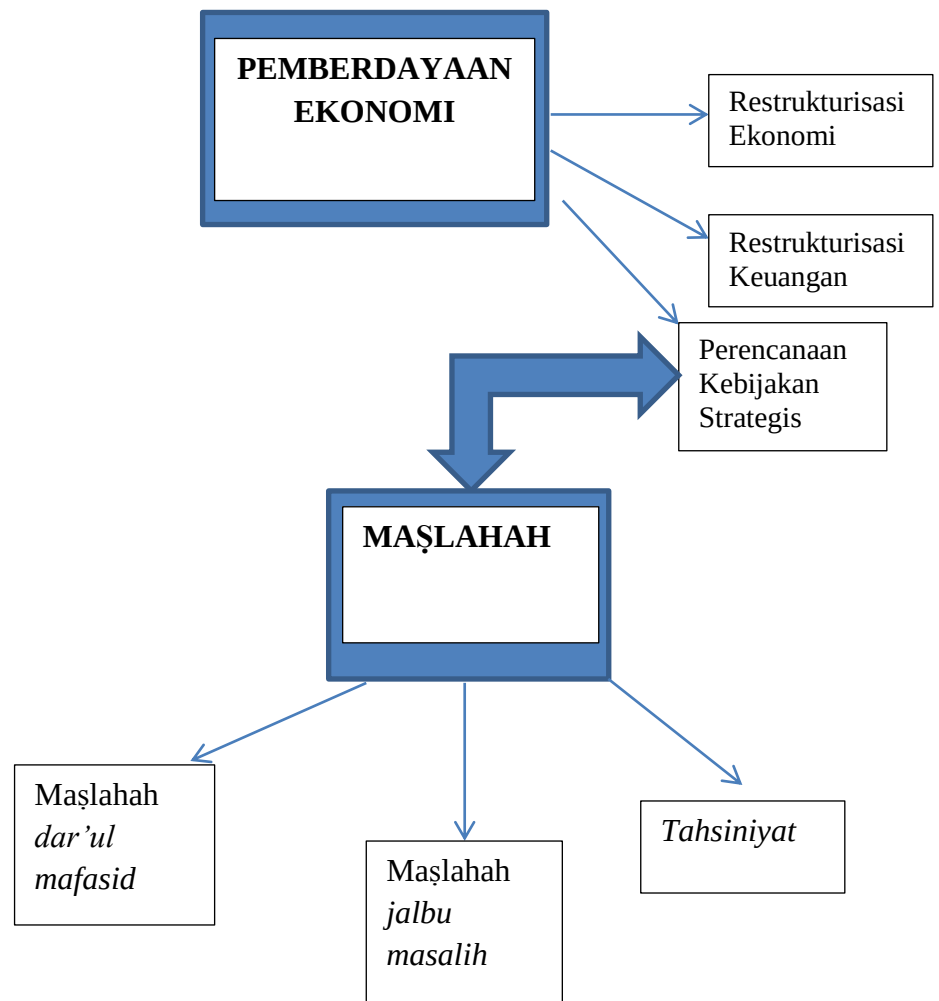
Wisata Taman Buah termasuk dalam jenis Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

b. Peraturan tentang Wisata Taman Buah

Dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, menyebutkan yang dimaksud dengan Fandeli (2002:25-26) menyatakan bahwa kawasan hutan untuk pelestarian dan pemanfaatan alam yang memiliki ciri tertentu sebagai wakil dari ecotype tertentu dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata dan wisata minat khusus. Kawasan hutan tersebut berupa Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Hutan Wisata atau Taman Wisata Alam. TWA merupakan salah satu kawasan konservasi yang mempunyai keunikan, dan keindahan yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah wisata dan pendidikan. TWA mempunyai daya tarik tertentu sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan bermanfaat bagi pembangunan daerah sekitar (Walangitan et al., 2015).

Gambar 2.1 Skema Kerangka Teori





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan penelitian lapangan ini dapat diketahui bagaimanakah pencapaian masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar Wisata Mangunan setelah adanya peran serta dari pemerintah berupa penyediaan lahan untuk berdagang. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif inilah yang akan memberikan pemahaman terkait suatu individu atau kelompok dalam suatu permasalahan yang ada didalamnya, dimana dalam penelitian ini permasalahan yang terkait adalah pemberdayaannya serta tingkat kemashlahatan. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dikarenakan kasus yang dikaji adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat serta pencapaian masalah pada masyarakat dan pedagang sekitar wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, memilih salah satu lokasi wisata, dimana lokasi tersebut telah memperoleh bantuan dana dari pemerintah sehingga dapat mengembangkan spot-spot wisatanya. Lokasi tersebut yaitu di Wisata Taman Buah Mangunan yang beralamatkan di Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Desember 2017 hingga bulan Februari 2018 yang bertempat di Dinas Pertanian, Kelautan, Pangan dan Perikanan Bantul, dan Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tersebut dapat disesuaikan dengan kebijakan dari pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, dan Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.

D. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah Pedagang yang berjualan disekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para Pedagang disekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul. Para pedagang ini berjumlah 10 orang. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan sampel, karena seluruh pedagang akan diwawancarai.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber utamanya. Ada beberapa pertimbangan untuk mengambil data primer yaitu (Kountur, 2007, p. 182):

- a. Cukup waktu dan dana untuk memperoleh data primer.
- b. Dimana saja data primer tersebut dapat diperoleh.
- c. Bagaimana cara memperoleh data tersebut.

2. Data Sekunder

Data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain. Data tersebut dapat berupa fakta, tabel, gambar, dan lain sebagainya. Walaupun data ini berasal dari penelitian orang lain untuk maksud dan tujuan yang berbeda, namun data ini bisa untuk dimanfaatkan. Adapun manfaat mengambil data dari data sekunder yaitu (Kountur, 2007, p. 178):

- a. Dapat diperoleh dengan cepat.
- b. Tidak membutuhkan dana yang besar.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tersebut secara akurat, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pihak tersebut adalah para pedagang yang berjualan disekitar Taman Buah Mangunan, Dinas Pertanian Bantul, serta para tokoh masyarakat seperti lurah, rw, dukuh dan juga rt, sehingga dengan begitu dapat diketahui pencapaian masalah sebelum dan sesudah adanya bantuan dari pemerintah.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis komponensial, (Bungin, 2003, p. 96) menjelaskan bahwa teknik ini biasanya dilakukan dengan cara mengenal gejala sosial dengan unsur-unsur yang sama, dengan begitu akan memudahkan untuk mengenali gejala tersebut, karena setiap gejala sosial yang memiliki kesamaan unsur, dipisahkan atau tidak, tetap akan mengelompokkan secara alamiah. Kemudian setiap gejala yang tidak memiliki kesamaan unsur dipisahkan atau tidak tetap akan menampilkan gejala unsur untuk memisahkan diri.

Teknik analisis komponensial digunakan dalam analisis kualitatif untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci.

Teknik dalam analisis ini baru layak dilakukan kalau seluruh kegiatan observasi dan wawancara secara berulang-ulang telah memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan melakukan beberapa tahap yaitu:

1. Penggelaran Hasil Observasi dan Wawancara

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan berkali-kali, dituliskan dalam lembaran-lembaran yang mudah dibaca. Yang dilakukan peneliti dalam observasi dan wawancara adalah melakukan observasi untuk memastikan terkait adanya bantuan penyediaan lahan dari pemerintah serta mewawancarai para pedagang terkait peran yang sudah dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta adakah perubahan dalam peningkatan penghasilan serta pencapaian masalah sebelum adanya bantuan dari pemerintah dengan setelah adanya bantuan dari pemerintah dalam bentuk penyediaan lahan. Yang terpenting dalam tahap ini hasil observasi dan wawancara dapat dibaca dengan jelas.

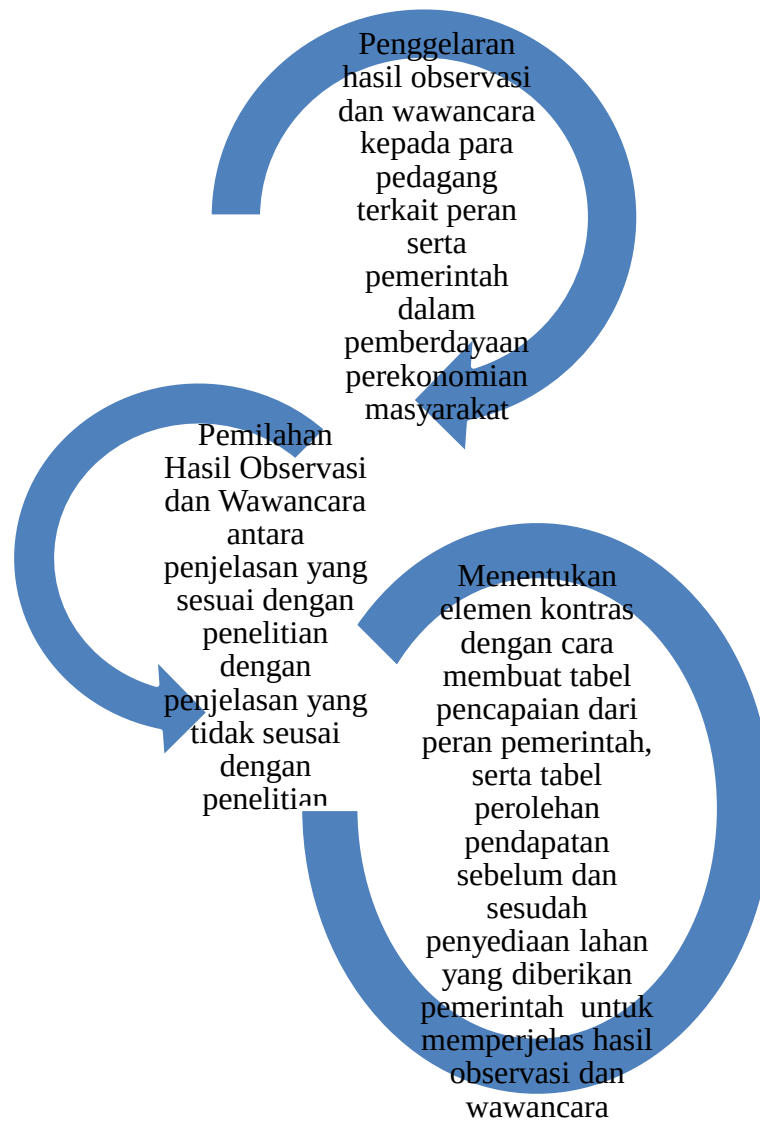
2. Pemilahan Hasil Observasi dan Wawancara

Peneliti selanjutnya melakukan pemilahan terhadap hasil wawancara. Dalam wawancara dengan para pedagang di Taman Buah Mangunan, ada beberapa pedagang yang menjelaskan hal-hal yang tidak dibahas dalam penelitian ini, sehingga perlu dilakukan pemilihan dan pengambilan kesimpulan yang tepat terkait penjelasan yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Menemukan Elemen-Elemen Kontras

Pada tahap ini, peneliti dapat membuat tabel tertentu yang dipakai untuk menjelaskan hasil wawancara. Dalam hal ini penulis membuat tabel berupa peran pemerintah yang sudah dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga dari tabel tersebut dapat diketahui apakah pemerintah sudah berperan atau belum. Serta penulis juga membuat tabel berupa perbandingan pendapatan yang diperoleh pedagang sebelum dan sesudah adanya bantuan penyediaan lahan dari pemerintah. Sehingga dapat diketahui apakah masyarakat memperoleh peningkatan masalah dan terberdaya atau tidak.

Gambar 3.1
Skema Teknik Analisis Komponensial



Sumber: (Bungin, 2003)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul

Awal mula berdirinya Taman Buah Mangunan ini saat membuka lahan yaitu pada tahun 2003, dan mulai dibuka sebagai tempat wisata adalah pada tahun 2006. Taman Buah ini berdiri dibawah naungan Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan. Pada awal mulanya, taman buah mangunan dengan lahan seluas 23 hektar didirikan hanya sebatas untuk konservasi penanganan lahan krisis. Namun pada akhirnya tempat tersebut dijadikan tempat wisata dan banyaknya para wisatawan yang datang sehingga tempat tersebut semakin berkembang setiap waktunya (Rujiyatmi, 2017).

Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang membuat pemerintah untuk menyediakan fasilitas yaitu adanya sepuluh warung yang tersedia untuk tempat wisatawan istirahat dan makan. Sehingga pemerintah memberikan lahan untuk para pedagang untuk bisa membuka warung ditempat tersebut. Adapun jenis dagangan yang disediakan disana berupa makanan seperti pop mie, mie goreng, mie rebus, nasi soto, bakso, dan snack-snack, serta minuman seperti es teh, es jeruk, teh hangat, dan minuman dingin lainnya. Serta beberapa dagangan titipan warga seperti wedang uwuh, tiwul, dan minuman herbal. Walaupun begitu namun pengelola dari Taman Buah Mangunan tidak terjun langsung dalam memantau para pedagang. Adapun foto dari warung tersebut seperti dibawah ini:



Tugas dari pada pengelola adalah menjaga kelestarian dari Pohon-Pohon yang ditanam pada taman tersebut. Pohon tersebut berasal dari pemberian Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan dalam rangka untuk menangani lahan krisis yang terjadi (Rujijatmi, 2017).

Pada Wisata ini, wisatawan dikenai biaya retribusi sebesar 5000 rupiah, dalam wisata ini wisatawan dapat memilih antara melihat pemandangan dengan mengendarai motor, atau berjalan kaki. Jika wisatawan memilih untuk berjalan kaki, sudah disediakan jalan khusus untuk mereka yang hendak melakukan wisata dengan berjalan kaki. Pengelola juga terus memperhatikan pertumbuhan dari

pohon-pohon tersebut. Pengelola juga belum lama ini melakukan penanaman pohon baru yaitu rambutan yang kemudian akan dikembangkan (Rujiyatmi, 2017).

Dalam wisata ini, wisatawan tidak hanya disajikan dengan pemandangan pohon-pohon saja, melainkan dapat melihat pemandangan sekitar Mangunan. Biasanya wisatawan datang pagi hari agar memperoleh *sunrise* dan saat ada kabut mereka akan terlihat seperti berada di negeri awan. Karena daerahnya yang cenderung dingin dan berada di dataran yang tinggi, sehingga banyak kabut yang datang dan membuat seakan berada di negeri di atas awan. Pemandangan inilah yang menjadi sasaran bagi para wisatawan, sehingga agar wisatawan dapat memperoleh pemandangan di pagi hari tersebut mereka akan menginap di salah satu penginapan atau *home stay* milik warga-warga Dusun Mangunan yang sudah disediakan di daerah Mangunan tersebut (Rujiyatmi, 2017).

B. Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul

Pemerintah menjelaskan bahwa peran yang sudah mereka lakukan untuk memberdayakan ekonomi Masyarakat Mangunan adalah dengan penyediaan lahan secara gratis dan tanpa dipungut biaya sewa, listrik, dan juga air, yang bisa digunakan sebagai tempat untuk berjualan di Taman Buah Mangunan tersebut, karena sejatinya tanah dengan luas 23 hektar ini sebagian adalah milik warga, namun pihak pemerintah tidak menyebutkan tepatnya berapa bagian yang dimiliki oleh warga, kemudian dari 23 hektar tanah tersebut di sewa seluruhnya oleh pemerintah daerah, dikarenakan warga sudah berkontribusi berupa tanah, dan akhirnya pemerintah menyediakan sebagian lahannya untuk para warga agar dapat digunakan sebagai tempat berjualan. Dengan begitu pemerintah mengharapkan perekonomian dari masyarakat akan meningkat (Yuni, 2017).

Namun pemerintah tidak pernah melakukan pemantauan terhadap para pedagang tersebut dengan alasan bahwa dengan penggunaan lahan yang telah pemerintah berikan maka masyarakat akan berdaya secara bertahap dengan sendirinya. Akan tetapi pemerintah tetap memiliki hubungan dan saling bersinergi dengan *POKDARWIS* (Kelompok Sadar Wisata) sehingga dapat saling

memberikan informasi untuk bisa maju bersama, pemerintah sendiri juga menjelaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan pemberdayaan dari segi ekonomi kepada para pedagang Taman Buah Mangunan, serta mereka juga tidak melakukan pelatihan untuk mengembangkan intelektual serta pelatihan untuk pengembangan potensi bagi para pedagang. Penyebab pemerintah tidak melakukan pemberdayaan lebih lanjut serta pemantauan kepada para pedagang Taman Buah Mangunan adalah dikarenakan adanya pemikiran dari pemerintah bahwa dari penggunaan lahan tersebut para pedagang akan terberdaya dengan sendirinya, sehingga masyarakat yang berusaha untuk terus memperbaiki dan mengembangkan warung-warung tersebut agar nyaman bagi para wisatawan (Yuni, 2017).

(Suyadi, 2017) menjelaskan bahwa semakin berjalannya waktu, Wisata Taman Buah Mangunan semakin berkembang, dan wisatawan semakin banyak, kemudian banyak yang mengajukan untuk berjualan disana, namun dikarenakan keterbatasan tempat sehingga pedagang yang akan berjualan dibatasi sepuluh pedagang saja.

Awal mula para pedagang diberikan lahan mereka mulai membangun sendiri-sendiri warung mereka, dan bahan yang digunakan adalah seng, yang mana apabila terjadi hujan, maka sengnya akan terbang dan merusak warung mereka. Sehingga (Suyadi, 2017) selaku Pak Dukuh dan Ketua dari komunitas pedagang disana mengatakan bahwa dalam berjualan yang harus di tegaskan dan di perhatikan terlebih dahulu adalah wajah dari warung tersebut, karena apabila warung tidak tertata dengan rapi atau berantakan maka wisatawan tidak ada yang mau untuk datang dan membeli di sana, sehingga dengan proses waktu demi waktu berkembanglah warung-warung tersebut menjadi indah dan enak untuk dipadang, serta apabila hujan tidak akan merusak warung-warung tersebut.

Disaat (Suyadi, 2017) belum menjabat sebagai ketua komunitas pedagang, uang iuran yang ditarik dari para pedagang tidak jelas alokasinya kemana, dan saat periode beliau, iuran yang ditarik berdasarkan pada pengeluaran para pedagang per minggunya, apabila pengeluaran setiap pedagang sudah tercatat semua, baru diperhitungkan akan ditarik iuran berapa untuk setiap pedagang.

Selain tampilan dari setiap warung, Pak Suyadi juga menerapkan bahwa semua makanan yang dijual harus sama harganya dan tidak boleh ada yang memainkan harga dan tidak boleh menjual sesuatu dengan harga yang mahal. Dan juga jika menjual atau memasak makanan, maka rasa dari makanan tersebut harus enak, dan untuk para pedagang juga harus berpakaian yang rapi dan harus berdandan, agar nyaman untuk dilihat oleh para wisatawan, dan akhirnya mereka menyepakati bahwa untuk hari Sabtu dan Minggu mereka mengenakan seragam yang sama agar wisatawan lebih nyaman untuk melihat penampilan dari para pedagang.

Dengan adanya inisiatif dari (Suyadi, 2017), akhirnya wisatawan yang datang menjadi semakin banyak dan ramai dari waktu ke waktu. Dan dalam berjualan tidak boleh terdapat persaingan dan harus saling tolong menolong. Setelah adanya pemberian lahan tersebut, akhirnya beliau menginisiatifkan untuk membuat produksi-produksi atau hasil usaha yang dapat diperdagangkan, seperti, tiwul, gorengan, hasil pertanian dan lain sebagainya, sehingga penghasilan yang diperoleh tidak hanya terbatas pada para pedagang Taman Buah Mangunan saja, melainkan warga sekitar Mangunan juga dapat memperoleh hasilnya.

Dan dengan adanya Wisata Taman Buah Mangunan ini, banyak wisatawan yang berkunjung, dan adapula yang melakukan MAKRAB (Malam Keakraban) disekitar Mangunan, sehingga banyak yang bermalam menggunakan *home stay* yang dibuat oleh para warga sekitar Mangunan, serta dengan adanya wisatawan yang menginap, mengharuskan untuk memasak untuk mereka, sehingga warga sekitar Mangunan kembali untuk dilibatkan, dan ketika wisatawan membutuhkan hiburan, maka warga akan memberikan hiburan sesuai dengan adat dan budaya yang ada di Daerah Mangunan tersebut, sehingga dengan ini masyarakat merasa diberdayakan khususnya dari segi perekonomian. Namun walaupun dengan adanya wisata Taman Buah Mangunan tersebut pedagang dan warga sekitar Mangunan sudah sedikit berdaya, namun pemerintah tidak melakukan kontrol secara berkala kepada mereka, karena (Eko, 2004, p. 257) menjelaskan bahwa dalam pemberdayaan sangatlah dibutuhkan pemantauan serta evaluasi, sehingga dengan begitu mereka dapat mengevaluasi diri dan mengembangkan usahanya

menjadi lebih baik lagi. Segala hal yang telah dilakukan adalah murni dari inisiatif para warga Mangunan tanpa ada bantuan dan pemantuan secara lanjut oleh pemerintah (Suyadi, 2017).

Pak Suyadi juga menjelaskan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali melakukan penyuluhan kepada para pedagang Taman Wisata Buah Mangunan, namun inisiatif dari para pedaganglah untuk mengundang pemerintah dan memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan, menurut beliau pemerintah dinilai lambat dalam menangani permasalahan yang terjadi khususnya pada para pedagang sekitar Taman Buah Mangunan (Suyadi, 2017).

Pemerintah tidak melakukan pemantauan kepada para pedagang setelah diberikannya lahan untuk digunakan sebagai warung tempat mereka berusaha. Pemerintah juga sudah lama tidak melakukan pelatihan untuk tanggap bencana kepada para pedagang, pelatihan yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah adalah pada tahun 2008 saat ada bencana gempa, mengingat cuaca yang sering terjadi hujan mengakibatkan banyaknya bencana seperti longsor dan lain sebagainya, maka sangat dibutuhkan bagi para pedagang untuk dapat memperoleh pelatihan tanggap bencana, mengingat pula bahwa daerah Wisata Taman Buah Mangunan berada di daerah perbukitan (Saykem, 2017).

Pemerintah juga tidak melakukan pelatihan kepada para pedagang agar mereka dapat beradaptasi dengan sekitarnya, (Saykem, 2017) menjelaskan bahwa warga disini adalah saling bertetangga dan sudah biasa untuk saling membantu, sehingga menurut beliau tidak perlu adanya pelatihan agar para pedagang dapat beradaptasi. Pemerintah juga belum mengadakan pelatihan untuk penggalan potensi dimana hal ini bertolak belakang dengan penjelasan (Jaelani, 2014) bahwa perlu adanya penggalan potensi untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat, pelatihan yang pernah dilakukan adalah hanya di dusun saja, sehingga khusus untuk para pedagang tidak ada pelatihan untuk penggalan potensi, namun dalam pemberian lahan ini, dan dalam pemberian lahan ini, pemerintah tidak melakukan pemungutan biaya apapun, termasuk air dan listrik kepada para pedagang, namun pemerintah tetap memberikan peraturan kepada para pedagang untuk tetap menjaga kebersihan, sehingga para pedagang

berinisiatif untuk menyewa petugas kebersihan untuk membersihkan daerah tempat mereka berjualan (Saykem, 2017).

Dalam pengambilan keputusan untuk berdagang di Taman Buah Mangunan tersebut tidak memerlukan keputusan dari pemerintah. Pemerintah juga tidak mengambil bagi hasil ataupun pemberian keuntungan kepada para pedagang, seluruh penghasilan yang diperoleh oleh pedagang sepenuhnya dimiliki oleh pedagang, tanpa ada yang diberikan kepada pemerintah (Saykem, 2017).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bu Titi, bahwa para pemerintah tidak memberikan pelatihan kepada para pedagang untuk dapat beradaptasi, namun menurut mereka bahwa para pedagang yang berjualan di daerah tersebut sesama warga Mangunan dan satu desa, sehingga mereka sudah saling kenal, bahkan mereka juga tidak segan untuk saling tolong-menolong kepada pedagang yang lain apabila dibutuhkan (Titi, 2017).

Bu Titi juga menyampaikan bahwa setelah adanya pelatihan tanggap bencana yang diberikan oleh pemerintah di tahun 2008 kepada warga di Desa Mangunan secara keseluruhan, pemerintah belum pernah sama sekali melakukan pelatihan untuk tanggap kembali kepada para warga dan khususnya kepada para pedagang di Taman Buah Mangunan, melihat pelatihan ini penting untuk diadakan dikarenakan waspada terhadap cuaca yang tidak stabil. Pemerintah juga tidak pernah melakukan pelatihan penggalian potensi yang khususnya diberikan kepada para pedagang Taman Buah Mangunan, yang mana hal ini dinilai penting untuk dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik dan berkembang (Titi, 2017).

Dalam pengambilan keputusan untuk berjualan disana juga tidak menjadi tugas dari pemerintah, Bu Titi menjelaskan bahwa awalnya ia dapat berjualan disana adalah karena mendengar berita dari tetangganya yang bekerja di Taman Buah Mangunan, awalnya Bu Titi adalah pedagang keliling yang menggunakan motor setiap harinya, namun setelah mendapat berita tersebut, akhirnya beliau mengajukan diri untuk dapat berjualan disana, hingga akhirnya beliau dapat berdagang disana, mendengar penjelasan dari Bu Titi menjelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah tidak memberikan pengumuman terkait pemberian lahan secara

gratis kepada para warga, hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Bu Titi bahwa beliau mengetahui berita tersebut dari tetangga yang bekerja di Taman Buah Mangunan (Titi, 2017).

Bu Titi juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemungutan biaya apapun baik lahan yang telah diberikan, air dan juga listrik, sehingga segala hasil keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dimiliki sepenuhnya oleh para pedagang, beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak melakukan pembukuan dalam usaha dagang yang beliau jalankan (Titi, 2017). Pemerintah seharusnya melakukan pelatihan untuk pembukuan kepada para pedagang, karena dengan pembukuan ini para pedagang akan lebih rapi dan lebih tertata dalam urusan keuangan, walaupun uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun langkah lebih baiknya jika dilakukan pembukuan, agar keuangan lebih tertata, dan juga sebagai antisipasi untuk hal-hal atau risiko yang tidak diinginkan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Warjiyem, bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pelatihan kepada para pedagang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar usaha berdagang mereka yang mana bertolak belakang dengan penjelasan dari (Jaelani, 2014) bahwa pemerintah perlu untuk melakukan pelatihan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dari para pedagang, namun menurut beliau pelatihan tersebut tidak perlu dilakukan karena para pedagang yang berjualan disitu adaah para tetangga mereka, sehingga mereka sudah kenal satu sama lain, bahkan beliau juga menjelaskan bahwa ada beberapa yang bukan berasal dari luar dusun, namun sudah bisa beradaptasi dan sudah akrab dengan pedagang yang lainnya (Warjiyem, 2017).

Beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah belum pernah melakukan pelatihan untuk tanggap bencana kepada para pedagang, namun pelatihan ini pernah dilakukan namun untuk tingkat desa saja (Warjiyem, 2017). Seharusnya para pedagang diberikan pelatihan secara khusus untuk dapat tanggap dalam segala bencana yang akan terjadi. Bu Warjiyem juga kembali menjelaskan bahwa untuk pelatihan penggalian potensi bagi para pedagang belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga para warga menginisiatifkan diri untuk menitipkan usaha-usaha mereka kepada para pedagang yang ada di Taman Buah

Mangunan, sebagai contoh di warung Bu Warjiyem dititipkan *souvenir* yang mana itu adalah bikinan dari warga sekitar Mangunan. Serta untuk keputusan dalam menjalankan usaha di tempat tersebut, pemerintah juga belum memberikan keputusan apapun, yang pemerintah lakukan sampai saat ini adalah sebatas pemberian lahan. Dan untuk perolehan keuntungan seluruhnya murni dimiliki oleh masyarakat tanpa ada pembagian keuntungan kepada pemerintah. Dalam hal ini pula pemerintah tidak membatasi keuntungan yang wajib diperoleh para pedagang, sehingga tidak ada batasan untuk penghasilan yang diperoleh oleh para pedagang (Warjiyem, 2017).

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh (Saliyem, 2018) bahwa pemerintah belum pernah memberikan pelatihan terhadap ancaman atau tanggap bencana yang dikhususkan kepada para pedagang, mengingat hal itu penting untuk dilakukan, dan seperti yang dijelaskan oleh Bu Warjiyem bahwa pemerintah juga tidak mengadakan pelatihan dalam beradaptasi kepada para pedagang, namun hal ini tidak terlalu dikhawatirkan, dikarenakan setiap dari para pedagang adalah saling kenal dan bertetangga, sehingga untuk pelatihan beradaptasi dirasa tidak perlu.

Pemerintah juga belum melakukan pelatihan untuk penggalan potensi kepada pedagang, karena menurut mereka dengan adanya penggalan potensi ini maka akan dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik lagi. Serta dalam berusaha disini, tidak ada pengambilan keputusan yang mengacu kepada pemerintah, dalam menjalankan usahanya para pedagang tidak dikenakan biaya tambahan atau diwajibkan untuk membayar bagi hasil kepada pemerintah. Sehingga segala perolehan keuntungan akan kembali kepada pemilik warung seluruhnya. Para pedagang disana juga menjelaskan bahwa hal yang dilakukan pemerintah sebatas pemberian lahan saja, bahkan untuk pembangunannya para pedagang sendiri yang membangun tempatnya (Saliyem, 2018).

Hal yang sama juga disampaikan oleh (Lanjar, 2018), bahwa pemerintah belum pernah melakukan pelatihan untuk tanggap terhadap bencana kepada para warga, namun hal ini tidak terlalu merisaukan mereka, karena setiap dari para pedagang sudah saling kenal, bahkan antara Bu Saliyem dan Bu Lanjar masih

bersaudara, sehingga sudah pasti kenal antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah juga belum pernah melakukan pelatihan untuk penggalan potensi kepada para pedagang, meskipun di desa sudah ada pelatihan seperti itu, tetapi bagi para pedagang secara khusus belum diadakan, hal ini sangat penting untuk dilakukan agar para pedagang bisa mengembangkan potensi mereka dan dengan potensi mereka tersebut dapat menambah penghasilan bagi keluarga.

Dalam hal ini pula, ketika para pedagang akan membuka usahanya mereka tidak memerlukan keputusan dari pemerintah, bahkan yang membangun warung adalah para pedagang itu sendiri. Dalam menjalankan usaha ini, para pedagang tidak diberikan batasan dalam perolehan keuntungan, sehingga mereka bebas mendapat keuntungan berapapun, dan hasil dari keuntungan atau penghasilan setiap para pedagang tidak dibagikan sebagian kepada para pemerintah, melainkan murni seluruhnya untuk para pedagang, dan nanti dari para pemilik warunglah yang akan membagi hasil dengan para penjaga warung tersebut. (Lanjar, 2018).

Penjelasan dari (Musinah, 2018) juga tidak berbeda dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa pemerintah belum pernah melakukan pelatihan untuk tanggap bencana serta ancaman dari luar, pemerintah juga tidak melakukan pelatihan untuk beradaptasi, namun para beliau menyampaikan bahwa mereka sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga tidak diperlukan adanya pelatihan. Pemerintah juga belum pernah melakukan pelatihan yang dikhususkan kepada para pedagang untuk dapat menggali potensi mereka, dimana dengan adanya penggalan potensi ini para pedagang bisa lebih menginovasi dalam melakukan usaha dagangannya.

Dan untuk pengambilan keputusan untuk berdagang tidak ada hubungan dengan pemerintah. Serta dalam menjalankan usaha tidak diberikan batasan untuk memperoleh keuntungan, serta hasil dari keuntungan tidak ada pembagian hasil atau bagian yang diberikan kepada pemerintah. Sehingga hasil tersebut utuh dimiliki oleh para pedagang (Musinah, 2018).

Hal yang sama juga disampaikan oleh (Suwarni, 2018), bahwa sampai saat ini pemerintah belum pernah memberikan pelatihan untuk beradaptasi dengan

lingkungan yang mana pelatihan itu dikhususkan kepada para pedagang, namun menurut beliau hal itu tidak perlu dilakukan karena pada pedagang disini sudah saling mengenal satu sama lain. Pemerintah juga belum pernah melakukan pelatihan tanggap bencana yang dikhususkan untuk para pedagang, walaupun pelatihan itu sudah pernah diadakan dilingkup desa namun itu sudah terjadi di tahun 2008, dan hingga tahun ini belum pernah ada pelatihan untuk tanggap bencana kembali, dan juga pelatihan yang dikhususkan untuk para pedagang belum pernah sama sekali dilakukan.

Pemerintah juga belum pernah melakukan pelatihan untuk penggalan potensi bagi para pedagang, namun menurut beliau bahwa pelatihan tersebut sudah pernah diadakan di desa mereka, dan hasil dari pelatihan tersebut ada yang menitipkannya di warung-warung para pedagang Taman Buah Mangunan, seperti wedang uwuh, tiwul, mainan ketapel, dan lain sebagainya, itu semua adalah buatan warga Mangunan. Untuk pengambilan keputusan dalam berdagang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, sehingga tidak ada keputusan apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada para pedagang tersebut (Suwarni, 2018).

Dan dalam peroleh keuntungan dari setiap pedagang tidak pernah di ambil sebagian untuk pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan batasan untuk perolehan keuntungan dari usaha berdagang yang dijalanka oleh para pedagang tersebut, pemerintah juga tidak memperbolehkan apabila para pedagang membayar uang air dan listrik yang telah pemerintah berikan, namun seiring berjalannya waktu para pedagang merasa tidak enak jika terus menggunakan listrik gratis yang diberikan pemerintah, dan juga para pedagang sudah banyak yang menggunakan kulkas, sehingga terkadang mengakibatkan listriknya padam sementara, sehingga dengan kejadian tersebut mereka menginisiatifkan untuk menyambung kabel listrik dan kemudian membayar iurannya tiap bulan, sehingga dengan begitu listrik sudah mereka usahakan sendiri, namun untuk air mereka masih menggunakan air dari Taman Buah Mangunan yang mana itu adalah pemberian dari pemerintah juga, namun dengan syarat tidak boleh menggunakan air terlalu berlebihan atau boros air (Suwarni, 2018).

Bu Sudarwati selaku pemilik warung juga mengatakan bahwa pemerintah belum pernah melakukan pelatihan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan, namun menurut beliau mereka sudah sama-sama kenal dan saling bertetangga sehingga tidak diperlukan adanya pelatihan tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah juga tidak pernah melakukan pelatihan untuk menghadapi ancaman atau tanggap bencana yang dikhususkan kepada para pedagang, pelatihan yang pernah diadakan adalah pada tahun 2008 dan itu berada di lingkup desa, namun untuk pelatihan yang dikhususkan kepada para pedagang belum pernah sama sekali dilakukan. Beliau juga memaparkan pemerintah belum pernah melakukan pelatihan yang dikhususkan kepada para pedagang untuk penggalan potensi mereka masing-masing, pelatihan yang pernah dilakukan pemerintah berada di lingkup desa juga (Sudarwati, 2018). Namun alangkah lebih baiknya agar pelatihan tersebut dapat diadakan khusus kepada para pedagang agar hasilnya lebih efektif dan lebih terlihat, karena pelatihan tersebut difokuskan hanya kepada para pedagang.

Bu Sudarwati juga menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk berdagang tidak ada hubungan dengan pemerintah, dan juga dalam menjalankan usahanya, keuntungan yang diperoleh menjadi milik pemilik warung seutuhnya dan tidak dibagi kepada pemerintah, pemerintah juga tidak membolehkan para pedagang untuk membayar iuran air dan listrik, pemerintah juga tidak memberikan batasan kepada para pedagang dalam memperoleh keuntungan, sehingga pedagang bebas mendapat keuntungan berapapun (Sudarwati, 2018).

Sehingga dari seluruh penjelasan yang telah diberikan oleh para pedagang, bahwa pemerintah tidak melakukan pelatihan untuk penggalan potensi khususnya untuk para pedagang, serta pemantauan secara berkala kepada para pedagang. Walaupun pelatihan penggalan potensi pernah dilaksanakan oleh pemerintah, namun itu hanya di lingkup desa saja, dan pelatihan itu sudah lama. Sehingga lebih baik lagi jika pelatihan untuk penggalan potensi yang dilaksanakan oleh pemerintah dikhususnya kepada pedagang juga, dan dilakukan secara berkala, agar mereka dapat memperoleh ide, dan dapat terus mengevaluasi usahanya, serta

mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Dalam hal ini pemerintah juga belum melakukan pembinaan bagi para pedagang untuk melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran selama berdagang yang mana hal tersebut penting untuk dilakukan dalam melakukan usaha, sehingga masih sedikit dari para pedagang yang membuat pencatatan tersebut. Walaupun menurut para pedagang hal itu tidak perlu dilakukan dikarenakan itu adalah usaha sendiri dan mayoritas langsung menggunakan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun alangkah baiknya apabila pemerintah memberikan pelatihan terkait pembukuan dan menjelaskan tentang pentingnya melakukan pembukuan itu, agar mereka pun sadar dan dapat mengaplikasikannya dalam berdagang dikemudian hari. Dengan begitu segala pengeluaran dan pemasukan lebih tertata dan lebih mudah untuk dipantau dan diatur.

Jika melihat dari fenomena diatas, seharusnya pemerintah tidak membiarkan para pedagang dalam menjalankan usahanya itu begitu saja, tetapi perlu adanya pemantauan dan kontrol serta evaluasi kepada para pedagang, agar para pedagang dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dengan adanya pemantauan dan kontrol yang rutin tersebut, hal ini seperti dijelaskan pada konsep pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, dalam pemberdayaan masyarakat harus terdapat prinsip keadilan, persamaan dan partisipasi ditengah-tengah masyarakat, serta menghargai etos kerja dan saling tolong menolong (Susilo, 2016). Pemberdayaan masyarakat akan terjadi apabila seluruh masyarakat memperoleh akses sumber-sumber secara merata. Sehingga disana terdapat unsur keadilan bagi seluruh masyarakatnya seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW (Munandar, 2008).

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya semata pemberian lahan saja, namun seharusnya pemberdayaan masyarakat dapat diperluas menjadi banyak hal, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dari segi ekonominya. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Serta meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Inilah yang menjadi tugas bagi pemerintah

dalam memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya pedagang di Taman Buah Mangunan.

Jika mengacu pada jurnal (Jaelani, 2014) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

1. Menciptakan suatu potensi yang dapat dikembangkan dari masyarakat.
2. Memperkuat potensi ekonomi, hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan serta membuka peluang ekonomi yang dapat dilakukan.
3. Mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi antar masyarakat.

Tabel 4.1 Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul

No	Indikator Pemberdayaan	Berperan	Belum Berperan
1.	Penyediaan lahan	√	
2.	Pelatihan menghadapi ancaman		X
3.	Pelatihan untuk beradaptasi dengan lingkungan		X
4.	Pelatihan penggalian potensi		X
5.	Sistem pengambilan keputusan		X
6.	Pemantauan dan evaluasi		X
7.	Modal		X
8.	Pelatihan pembukuan		X

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah selaku penanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah adanya intervensi negara atau pemerintah untuk golongan yang lemah agar mereka dapat mencapai sumber-sumber utama yang menyediakan kebutuhan. Selain indikator yang terdapat di dalam tabel, terdapat pula indikator

lain dalam pemberdayaan ekonomi yaitu pelatihan, permagangan, penyusunan proposal, pendampingan serta jaringan bisnis, namun para pedagang menjelaskan bahwa seluruhnya belum ada yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk membuat suatu mekanisme yang dapat mengatur pelaksanaan agar terbuka serta terkontrol, dengan begitu pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata (Munandar, 2008).

Dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya masyarakat dan pemerintah menjadi satu kesatuan, karena tanpa masyarakat, pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan, begitupun tanpa pemerintah, masyarakat akan bingung dan sulit dalam memberdayakan diri mereka sendiri. Sehingga masyarakat seharusnya dapat tetap menjaga komunikasi dan pemantauan kepada para pedagangnya, karena dengan adanya tingkatan yang paling atas inilah yang sangat membantu pemberdayaan masyarakat, hal ini disebabkan pemerintah menjadi birokrasi yang sangat unggul dikarenakan banyaknya keunggulan serta kekuatan dibanding masyarakat, seperti halnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. (Eko, 2004, p. 256).

Peran pemerintah yang dijelaskan diatas, berbeda dengan pembahasan dari jurnal (Munandar, 2008) yang menjelaskan terkait pemberdayaan masyarakat yang mengacu kepada pemerataan kesempatan dan keadilan, namun dalam penelitian penulis pemerataan dan keadilan sudah dijalankan oleh pemerintah, sehingga yang dibahas oleh penulis adalah pengelolaan lanjut oleh pemerintah setelah adanya pemberian bantuan.

Penelitian yang penulis lakukan pun berbeda dengan penelitian (Kartasasmita, 1995) yang mana beliau membahas tentang kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi, sehingga menyebabkan perlunya pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan dalam penelitian, dikarenakan penelitian yang penulis bahas tidak menyangkut terkait kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya pedagang Taman Buah Mangunan.

Penelitian penulis juga berbeda dengan penelitian (Karsidi, 2001), yang mana lebih cenderung kepada pembangunan untuk masyarakat sipilnya secara khususnya, namun pada penelitian penulis ini lebih membahas kepada pemberdayaan masyarakat khususnya pedagang, yang mana dengan pemberdayaan pedagang tersebut, mereka dapat memiliki inisiatif untuk lebih mengembangkan usahanya, sehingga meningkatkan omzet penjualan mereka.

Penelitian penulis juga berbeda dengan penelitian (Ketut, 2005) yang menjelaskan pemberdayaan masyarakat untuk daerah kumuh di Bali, namun yang penulis jelaskan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat untuk para pedagang dilokasi wisata, yang lokasi wisata serta rumah tempat tinggal para pedagang tidak dikategorikan sebagai tempat yang kumuh.

Dari penjelasan para pedagang dan tokoh masyarakat, pemerintah memang sudah melakukan pemberdayaan bagi para pedagang mereka tidak melakukan pemantauan berkelanjutan, sehingga dampaknya adalah masyarakatlah yang melakukan inisiatif dan mengumpulkan dana dari swadaya masyarakat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa, masih banyak peran yang belum dijalankan oleh pemerintah, sehingga lebih banyak pemberdayaan pedagang yang belum dilakukan oleh pemerintah.

Variabel dalam indikator pemberdayaan masih belum terpenuhi oleh pemerintah, sehingga para pedaganglah yang melakukan pengembangan usahanya dengan sendirinya tanpa ada bantuan dan pengelolaan serta pemantuan dari pemerintah.

Dengan begitu peran pemerintah masih kurang dalam pemberdayaan masyarakat serta masih kurang dalam peningkatan masalah bagi para pedagang. Meskipun menurut para pedagang sudah mengalami kesejahteraan, namun akan lebih tersejahterakan lagi apabila pemerintah turut serta dalam memberdayakan dan memantau serta melakukan pengelolaan dan pemberian bantuan dana untuk pengembangan usaha dari para pedagang tersebut.

Maka dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya melakukan pemberdayaan secara maksimal kepada masyarakatnya. Karena hal ini telah dibuktikan oleh para pedagang dan (Suyadi, 2017) selaku tokoh masyarakat

bahwa pemerintah terbilang lambat dalam mengembangkan setiap daerah wisata khususnya bagi pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan, salah satunya adalah mereka belum memperoleh berbagai pelatihan yang dapat mengembangkan potensi mereka.

Pemerintah juga tidak melakukan pemantauan secara berkala kepada para pedagang, yang mana pemantauan ini sangat diperlukan sebagai strategi dalam manajemen pemberdayaan masyarakat yang baik. Tanpa pemantauan mereka tidak bisa untuk mengevaluasi diri mereka dan tidak bisa mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini seharusnya pemerintah harus lebih sering bertemu dengan para pedagang dan tetap menjaga komunikasi dengan tokoh masyarakat serta para pedagang, sehingga dengan komunikasi yang terjaga akan menjaga hubungan keduanya juga, karena seharusnya dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya masyarakat yang berjalan, tetapi perlu adanya intervensi dari pemerintah selaku elemen yang paling atas dan memiliki kekuasaan yang lebih, sehingga dapat membantu masyarakat apabila dibutuhkan. Serta dengan begitu juga dapat bertukar pikiran serta menyatukan ide antara pemerintah dengan para pedagang khususnya agar dapat diambil jalan yang terbaik sehingga dapat mengembangkan usaha para pedagang menjadi lebih baik, dan meningkatkan minat wisatawan.

Dengan banyaknya wisatawan yang datang maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan bagi para pedagang antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000 dan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari memperoleh peningkatan juga. Sebenarnya pedagang yang berjualan disana terdapat sepuluh orang, namun dikarenakan yang satu sibuk sebagai guru, sehingga jarang membuka warungnya, dan yang satu lagi istrinya habis melahirkan sehingga beliau cuti sementara untuk tidak berjualan (Saliyem, 2018).

Secara ekonomi, para pedagang di Taman Buah Mangunan belum terlalu berdaya, hal ini disebabkan karena indikator dalam pemberdayaan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, namun nyatanya belum dilakukan, seperti diadakannya pelatihan usaha dan juga segala pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi pedagang. Seluruh hal ini belum dilakukan oleh pemerintah.

Sehingga apabila pedagang sudah merasa berdaya secara ekonomi, itu semua adalah karena inisiatif dari para warga untuk bisa mengembangkan usaha menjadi lebih baik lagi.

Adapun kendala pemerintah belum melakukan pemberdayaan ekonomi secara lebih lanjut adalah karena mereka berfikir bahwa dengan penyediaan lahan tersebut pasti masyarakat sudah akan berdaya dengan sendirinya dan akan melakukan banyak pengembangan-pengembangan. Namun seharusnya tetap memerlukan adanya intervensi pemerintah selaku pihak yang paling tinggi yang memiliki wewenang yang lebih banyak sehingga dapat membantu para pedagang untuk dalam memberdayakan perekonomian.

Peran serta yang dilakukan pemerintah juga masih ternilai kurang, hal ini terbukti dengan banyaknya indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat yang seharusnya pemerintah berperan dalam hal tersebut, namun sampai saat ini belum ada peran tersebut yang dilakukan, seperti bantuan penyertaan modal untuk mengembangkan usaha para pedagang. Modal adalah hal terpenting yang menjadi faktor untuk bisa mengembangkan suatu usaha, tanpa bantuan modal dari pemerintah, masyarakat akan susah untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah juga seharusnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pedagang, namun hal itu juga belum dilakukan oleh pemerintah. Sehingga peran pemerintah masih terbilang sedikit dalam memberdayakan ekonomi para pedagang.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa peran yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi para pedagang masih sangat sedikit, namun walaupun peran yang dilakukan terbilang sedikit, namun para pedagang sudah dapat merasakan perubahan berupa peningkatan pendapatan, adapun penjelasan ada pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Pendapatan Rata-Rata Per bulan Para Pedagang

No	Nama	Pendapatan Rata-Rata berdagang
1.	Warjiyem	Antara Rp 1.000.000-Rp 5.000.000
2.	Saliyem	Antara Rp 1.000.000-Rp 5.000.000
3.	Titi	$\geq$ Rp 5.000.000
4.	Saykem	$\geq$ Rp 5.000.000
5.	Suwarni	Antara Rp 1.000.000-Rp 5.000.000
6.	Sudarwati	Antara Rp 1.000.000-Rp 5.000.000
7.	Musinah	$\geq$ Rp 5.000.000
8.	Lanjar	Antara Rp 1.000.000-Rp 5.000.000

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Selain terdapat perubahan dalam pendapatan para pedagang, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pemerintah telah menyediakan lahan untuk digunakan sebagai tempat para pedagang untuk berjualan di Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul tersebut, sehingga jika kita ilustrasikan bahwa harga satu petak warung pedagang selama setahun adalah Rp 700.000, sehingga jika dikalikan dengan 3 tahun mereka telah berjualan sehingga didapati hasilnya adalah Rp 2.100.000, sehingga selama mereka berjualan sudah memperoleh modal sekitar Rp 2.100.000. Jika melihat dari ilustrasi diatas, maka pemerintah sudah berkontribusi dalam pemberian modal bagi para pedagang. Sehingga dalam pemberian lahan tersebut pemerintah telah berkontribusi senilai kurang lebih Rp 2.100.000.

C. Pencapaian Masalah Bagi Masyarakat Sekitar Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul Sebelum dan Sesudah Adanya Bantuan Dari Pemerintah

Bagi para pedagang Taman Buah Mangunan, jika kembali membahas tentang variabel pemberdayaannya, mereka menjelaskan bahwasanya mereka mendapatkan lahan untuk berjualan secara gratis tanpa dipungut apapun termasuk biaya listrik dan air dengan peraturan untuk tetap menjaga kebersihan, sehingga masyarakat berinisiatif untuk menyewa petugas untuk membersihkan sekitar mereka dan merekapun tidak merasa terbebani keputusan mereka tersebut, tidak hanya itu adapun inisiatif lain yang dilakukan agar warung para pedagang ramai pengunjung dengan mengenakan seragam yang sama setiap hari Sabtu dan Ahad (Suyadi, 2017). Sehingga dalam hal ini pemerintah sudah melakukan kontribusi dalam pemberdayaannya, namun dari segi pemberdayaan yang secara lebih lanjut pemerintah belum melakukan beberapa hal seperti pemberdayaan untuk kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman serta dalam pengembangan inovasi serta potensi bagi para pedagang, sehingga para wargalah yang mengembangkan inovasi mereka untuk meramaikan warung tersebut, contoh yang lain adalah dengan menitipkan kerajinan tangan dan lain sebagainya dari warga sekitar yang memiliki potensi dalam bidang tersebut untuk di warung para pedagang Taman Buah Mangunan ini (Warjiyem, 2017).

Adapun contoh inovasi lain yang diciptakan oleh para pedagang yaitu segala bentuk makanan minuman harus sama rata dalam segi harga serta rasa dari makanan harus enak, serta pelayanan kepada wisatawan juga harus sopan. Beliau juga menjelaskan bahwasanya pemerintah tidak memberikan bagi hasil atau pembagian keuntungan antara para pedagang dengan pemerintah, sehingga keuntungan akan kembali kepada para pedagang seluruhnya. Walaupun dalam pemberdayaan masyarakatnya, pemerintah tidak secara langsung memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pedagang, namun dengan adanya bantuan untuk penggunaan lahan untuk berjualan tersebut mereka dapat memperoleh penghasilan yang mana dengan penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga (Warjiyem, 2017).

Bu Warjiyem selaku pemilik dari warung di Taman Buah Mangunan juga menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan pemberian lahan untuk digunakan sebagai tempat untuk berdagang bahwa perkembangan dari usahanya berdagang adalah semakin meningkat, serta perekonomian keluarga juga semakin meningkat dan dengan peningkatan tersebut, sehingga beliau bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih dari biasanya, dan beliau berharap bahwa di tahun 2018 ini akan semakin meningkat lagi para wisatawanannya, sehingga akan meningkatkan penghasilan para pedagang juga dan dengan begitu kebutuhan hidup juga bisa lebih terpenuhi (Warjiyem, 2017).

Bu Saykem pun juga menjelaskan bahwasanya dengan adanya bantuan dalam pemberian lahan tersebut mereka mendapatkan penghasilan yang semakin bertambah dari tahun ke tahun dikarenakan wisata yang semakin ramai setiap waktunya. Sehingga dengan adanya penghasilan tersebut mereka dapat menafkahi keluarganya serta memperoleh kesejahteraan dan masalah bagi keluarga para pedagang tersebut (Saykem, 2017).

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Bu Titi, bahwa pada tahun 2014 saat Taman Buah Mangunan baru-barunya berdiri, wisatawan yang datang hanya satu atau dua orang saja, namun seiring berjalannya waktu, wisatawan semakin banyak yang datang dan warung-warungpun ikut ramai, sehingga meningkatkan pendapatan para pedagang, dan dengan peningkatan pendapatan inilah para pedagang dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum Bu Titi berjualan di Mangunan, awalnya beliau adalah pedagang keliling yang berjualan menggunakan motor, namun setelah mendengar berita dari tetangganya yang bekerja di Taman Buah Mangunan bahwa pemerintah memberikan lahan secara gratis untuk para warga yang ingin membuka usaha berdagang, maka beliau pun akhirnya membuka warung di Taman Buah Mangunan tersebut. Dan menurut beliau terdapat perbedaan yang signifikan dalam perolehan pendapatan antara saat beliau masih berjualan secara keliling menggunakan sepeda motor, dengan saat beliau memiliki warung di Taman Buah Mangunan tersebut, sehingga beliau menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan tersebut, beliau sangat terbantu dan

dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Titi, 2017).

Dengan adanya bantuan dalam pemberian lahan dari pemerintah ini, terdapat banyak perbedaan, karena awalnya ia hanyalah seorang kuli bangunan, kemudian setelah menjadi pedagang di Taman Buah Mangunan, ia dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga lebih banyak dibandingkan saat masih menjadi kuli bangunan, sehingga dengan begitu kesejahteraan beliau pun semakin meningkat dari waktu ke waktu, dikarenakan Taman Buah Mangunan yang semakin waktu semakin ramai dikunjungi wisatawan, dan dengan begitu akan meningkatkan pendapatan bagi para pedagang Taman Buah Mangunan tersebut (Musinah, 2018).

Banyak sekali perkembangan yang diperoleh oleh para pedagang setelah adanya bantuan dari pemerintah, karena awal mulanya wisata yang masih sepi, hingga sekarang wisata yang semakin ramai menciptakan wisatawan yang semakin banyak dan meningkatkan pendapatan bagi para pedagang. Dan dengan adanya peningkatan pendapatan ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup baik pangan, sandang serta papan. Bahkan pemerintah juga tidak memungut biaya untuk listrik dan air, namun dikarenakan para pedagang yang tidak enak dengan penggunaan listrik yang gratis, sehingga mereka melakukan inisiatif untuk membeli kabel dan menyambungkannya sendiri, dan membayar iuran setiap bulannya kepada ketua komunitas pedagang tersebut. Dan untuk air mereka bebas menggunakannya, namun dalam pemakaian airnya tidak boleh berlebihan ataupun boros. Serta untuk setiap Sabtu dan Minggu mereka mengadakan gotong-royong untuk bersih-bersih bersama, agar tetap menjaga kebersihan dan menciptakan pemandangan yang indah dan menarik minat wisatawan. Mereka juga menyewa petugas kebersihan untuk membersihkan wilayah warung mereka agar senantiasa bersih dan rapi, sehingga dari perkembangan dari Wisata Taman Buah Mangunan yang beliau rasakan ini, beliau merasakan dampak yang positif dengan adanya pemberian lahan tersebut, beliau merasa kesejahteraan bagi keluarganya semakin meningkat, karena dengan peningkatan wisatawan tersebut penghasilan para pedagang juga semakin meningkat (Suwarni, 2018).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bu Sudarwati, bahwa setelah adanya pemberian lahan untuk mereka berjualan, maka kehidupan keluarga beliau lebih terjamin dan beliau pun dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kesejahteraan keluarga semakin meningkat, ditambah lagi para wisatawan yang semakin ramai berdatangan seiring berjalannya waktu, sehingga pendapatan para pedagang semakin meningkat pula. Dan dengan penghasilan dari berdagang di Taman Buah Mangunan tersebut kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan dapat terpenuhi dan dengan pencapaian penghasilan yang semakin meningkat setiap waktunya, beliau merasa bahwa hidup keluarga beliau lebih terjamin dibandingkan sebelumnya (Sudarwati, 2018).

Bu Saliyem selaku penjaga warung yang dimiliki oleh Pak Ari juga merasa diuntungkan dengan adanya pemberian lahan ini, karena dengan pemberian lahan ini, beliau memperoleh pekerjaan dari pemilik warung untuk menjaga warung tersebut, dan dengan semakin meningkatnya wisatawan, maka penghasilan pun semakin meningkat, serta bagi hasil antara pemilik dengan Bu Saliyem juga semakin meningkat, dengan begitu beliau dapat memenuhi kebutuhan hidup beliau bersama keluarga (Saliyem, 2018). Dengan adanya pemberian lahan ini, banyak dari warga yang dipekerjakan dengan para pemilik dari warung yang mereka milik, biasanya mereka dipekerjakan apabila pemilik memiliki pekerjaan ataupun kewajiban yang lebih penting yang harus dijalankan, sehingga mereka meminta tolong kepada tetangganya untuk dapat menjaga warung mereka, dengan begitu dengan adanya pemberian lahan tersebut, maka setiap warga juga saling memberikan peluang pekerjaan untuk setiap warga yang lainnya, sehingga penghasilan yang diperoleh oleh pemilik juga dibagikan dengan tetangga tersebut, sehingga dari sini terdapat kesejahteraan sosial setiap warga, warga yang memiliki penghasilan lebih membantu tetangga lain yang membutuhkan pekerjaan, dengan begitu menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam desa Mangunan tersebut.

Bu Lanjar pun sama seperti Bu Saliyem, beliau dimintai tolong oleh pemilik dari warung tersebut yang bernama Bu Iim untuk menjaga warung tersebut. Berbeda dengan Bu Saliyem yang sudah lama menjaga di warung Pak

Ari tersebut, Bu Lanjar baru 2 bulan menjaga warung tersebut, namun menurut beliau dengan semakin meningkatnya wisatawan, maka penghasilan dari warung pun semakin meningkat, Bu Lanjar pun merasakan perbedaannya saat wisatawan semakin ramai penghasilan dalam berjualan pun ikut meningkat, sehingga bagi hasil yang diperoleh juga meningkat dan dengan begitu beliau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kesejahteraan baik pemilik warung maupun Bu Lanjar sebagai penjaga warung juga semakin meningkat. Namun menurut beliau, walaupun terdapat peningkatan pendapatan, tetapi dengan semakin banyaknya wisata yang ada di Mangunan membuat persepsi kepada Bu Lanjar jika tidak adanya wisata yang baru tersebut kemungkinan pendapatan para pedagang di Taman Buah Mangunan bisa lebih meningkat secara signifikan (Lanjar, 2018).

Bagi tokoh masyarakat sekitar Taman Buah Mangunan, bahwa dengan adanya pemberian lahan dari pemerintah ini serta adanya Taman Buah Mangunan ini, mereka merasa diuntungkan sehingga dengannya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan juga beliau merasa bahwa dengan adanya pemberian lahan tersebut memiliki dampak yang positif kepada para warganya, khususnya para pedagang di Taman Buah Mangunan. Serta dengan adanya pemberian lahan ini, tokoh masyarakat menginisiatifkan agar para warga membuat produksi baik kerajinan tangan maupun yang lain sebagainya untuk dijual kepada wisatawan. Serta hasil pertanian dalam bentuk buah dari masyarakat juga dapat dijual kepada wisatawan (Suyadi, 2017).

Tak hanya itu para wargapun juga menyediakan *home stay* untuk para wisatawan, serta masakan yang enak dari Mangunan tersebut, serta wisata alam yang semakin berkembang, serta budaya, adat, dan seni khas dari Mangunan. Sehingga seluruh masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan wisata dan dari hal inilah dapat terciptanya pemberdayaan baik dari sisi pedagang Taman Buah Mangunan maupun masyarakat sekitar Mangunan. Namun sejatinya segala hal yang dilakukan oleh masyarakat Mangunan adalah murni dari inisiatif masyarakat tanpa bantuan dari pemerintah, karena mereka menganggap bahwa pemerintah sangat lambat dalam hal pengembangan wisata di daerah Mangunan tersebut (Suyadi, 2017).

Dan dari segala kegiatan yang sudah diinisiatifkan oleh warga sekitar belum memperoleh dana dari pemerintah, sehingga warga memperoleh dana dari swadaya masyarakatnya dan menggunakan bahan-bahan yang mudah dicari dan tidak memungut biaya, dan keuntungan warga adalah diambil dari biaya parkir setiap wisata yang ada di daerah Mangunan tersebut. Alasan warga mengumpulkan dana dari parkir adalah dikarenakan jika warga memungut biaya untuk wisata tersebut akan dilarang karena termasuk dalam pungutan liar. (Suyadi, 2017) menjelaskan bahwa segala usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat baik para pedagang maupun masyarakat sekitar tidak pernah dilakukan pengawasan oleh pemerintah, namun warga tetap mengundang pemerintah untuk datang dan menjelaskan terkait segala inisiatif yang telah mereka lakukan. Pak Suyadi juga menjelaskan bahwa pungutan dana desa oleh warga yang diberikan kepada pemerintah untuk kebutuhan desa sudah di terima pihak pemerintah namun dananya tidak pernah diberikan (Suyadi, 2017).

Dengan segala hal yang telah Pak Suyadi usahakan, beliau tetap menjelaskan pula bahwa dengan adanya pemberian lahan tersebut, kesejahteraan para pedagang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan hingga sekarang yang mengelola Taman Buah Mangunan adalah para pemuda di Mangunan tersebut dan tidak pernah ada pengelolaan dari pihak pemerintah (Suyadi, 2017).

Jika berbicara masalah masalah, tentu akan membahas tentang peran dari pemerintah dalam pemberdayaannya. Suatu masyarakat akan berdaya apabila sudah memenuhi variabel-variabel tersebut, adapun variabelnya yaitu: Pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, adanya kemampuan untuk beradaptasi ataupun berbaur dengan segala perubahan lingkungan yang ada. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi segala sesuatu yang membahayakan yang datang dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam diri mereka sendiri (Jaelani, 2014). Dengan adanya variabel tersebut, jika masyarakat sudah berdaya, maka secara tidak langsung akan menciptakan masalah bagi para masyarakat.

Walaupun pemerintah sudah memberikan lahan secara gratis yang mana hal tersebut dapat membantu para pedagang dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya, dan juga para pedagang sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya, namun realita yang terjadi adalah para pedagang belum memperoleh pelatihan terkait segala sesuatu yang dapat membahayakan diri para pedagang tersebut, hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kondisi cuaca yang akan berdampak pada longsor, sehingga pada hakikatnya mereka belum memiliki kemampuan untuk menghadapi segala bahaya yang akan datang. Para pedagang juga belum memperoleh pelatihan secara khusus untuk dapat melatih kemampuan dan inovasi mereka untuk dapat berkreasi dalam mengembangkan usahanya, dengan begitu para pedagang masih belum memperoleh kemampuan untuk dapat berkreasi dan berinovasi dalam diri mereka.

Maşlahah diartikan sebagai kemanfaatan, kebaikan serta kepentingan, dan juga segala hal yang dapat mendatangkan kebaikan (Arfan, 2013). Adapun indikator pencapaian maşlahah masyarakat Mangunan sebelum dan sesudah memperoleh penyediaan lahan dari pemerintah seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Pencapaian Maşlahah Masyarakat Mangunan Sebelum dan Sesudah Memperoleh Bantuan dari Pemerintah

Indikator	Sebelum	Sesudah
<i>Daruriyah</i>	Belum sepenuhnya dapat terpenuhi	Sudah dapat terpenuhi
<i>Hajiyah</i>	Belum sepenuhnya dapat terpenuhi	Sudah dapat terpenuhi
<i>Tahsiniah</i>	Belum sepenuhnya dapat terpenuhi	Sudah dapat terpenuhi

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Islam mengajarkan bahwasanya kesejahteraan tidak hanya bagi individu saja melainkan adanya kesejahteraan sosial, dengan begitu akan terciptanya suatu hubungan yang erat antara individu satu dengan yang lain. Dengan adanya hubungan ini akan menciptakan kerja sama yang baik bagi masyarakat.

Izzudin menjelaskan bahwa menurutnya masalah adalah untuk memperoleh manfaat dan menghindari bahaya, yang kemudian akan menghasilkan kesejahteraan bagi manusia (Johari, 2013).

(Pusparini, 2015) menjelaskan bahwa menurut Al-Ghazali kesejahteraan akan tercipta apabila memperoleh beberapa aspek yaitu; *Hajiyah*, *Tahsiniyah*. *Daruriyah* adalah kemashlahatan yang paling pokok dan wajib untuk dipenuhi, jika hal ini tidak dapat terpenuhi maka akan membahayakan kehidupan manusia tersebut. *Hajiyah* adalah pemenuhan kebutuhan yang akan menciptakan kebahagiaan dan menghilangkan kesengsaraan, jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi maka manusia tersebut akan mengalami kesulitan. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan hidup sebagai pelengkap untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka hidup manusia kurang nikmat, namun tidak membahayakan dan menyengsarakan kehidupan manusia tersebut. Sejatinya tujuan dari Syariat Islam menurut Al-Ghazali adalah adanya perlindungan dalam agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan kekayaan atau harta (*al-mal*) (Pusparini, 2015).

Pada dasarnya dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini, maka akan menciptakan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri, yang mana dengan adanya pemenuhan kebutuhan tersebut, masyarakat akan menjadi lebih sejahtera. Adapun indikator bahwa mereka dikatakan sudah dapat memenuhi kebutuhan yaitu seperti kebutuhan dasar mereka sudah dapat terpenuhi seperti pangan, sandang, serta papan. Terpenuhinya pula kebutuhan psikis mereka, serta kebutuhan sosial dan spiritual. Makna kesejahteraan masyarakat tidak hanya membahas tentang perekonomian saja, melainkan membahas pula bagaimanakah hubungan sosial antar masyarakat satu dengan yang lainnya, maka dari itu kesejahteraan itu juga membutuhkan kesejahteraan dalam bentuk psikologis dari masyarakatnya (Kurnia, 2015, p. 40).

Sumardjo dalam Maharani (2012) mengatakan bahwa ketika masyarakat terbilang sudah sejahtera, maka pemberdayaan yang dilakukan sudah dapat dikatakan berhasil, karena masyarakat yang sudah sejahtera dapat memahami diri mereka sendiri, serta mengetahui potensi apa yang terdapat dalam diri mereka

masing-masing, mereka juga mampu merencanakan, memperkirakan serta mengantisipasi segala kejadian yang akan terjadi dimasa mendatang, mereka juga mampu untuk saling bermusyawarah dan bertukar pikiran serta gagasan, mereka juga menjadi lebih bertanggung jawab atas segala perilaku yang dilakukannya (Kurnia, 2015, p. 42).

Dari penelitian penulis, berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Arfan, 2013), ia menjelaskan tentang masalah yang mana masalah tersebut lebih mengacu kepada batasan-batasan dalam masalah yang mana batasan tersebut adalah teori yang dibuat oleh Al-Buthi, dalam penelitian Abbas menjelaskan bahwa menurut Al-Buthi bahwa apabila ingin mencapai suatu masalah tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang telah diberikan. Sehingga dalam penelitian Abbas ini sepenuhnya membahas tentang *masalah mursalah* sesuai dengan teori Al-Buthi beserta batasan-batasan yang diberikan oleh Al-Buthi. Sedangkan dari penelitian penulis, penulis lebih membahas pada pencapaian masalah yang dialami oleh para pedagang setelah pemberian bantuan dari pemerintah, kemudian membandingkannya dengan pencapaian masalah sebelum para pedagang tersebut diberikannya bantuan dari pemerintah, sehingga konteks yang dibahas sedikit berbeda.

Penelitian penulis juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosyadi, 2013), ia menjelaskan bahwa dalam penelitiannya membahas tentang masalah menurut perspektif Syatibi, yang mana masalah tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 makna, yaitu makna *haqiqi* dan makna *majazi*, dalam penelitiannya Imron juga menjelaskan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari *kemudharatan* atau bahaya. Sehingga dalam jurnalnya ia lebih spesifik membahas tentang penerapan perspektif Syatibi, dalam penelitiannya, Imron menjelaskan sedangkan dalam penelitian penulis, penulis membahas tentang masalah yang berkaitan dengan bantuan dari pemerintah, dimana adanya perbedaan pencapaian sebelum adanya bantuan dari pemerintah serta setelah adanya bantuan dari pemerintah, sehingga yang penulis bahas disini adalah tentang perbedaan pencapaian masalahnya, sehingga penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Imron.

Penelitian penulis juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Johari, 2013), jika Johari menjelaskan dalam penelitiannya terkait masalah perspektif Izzudin Ibn Abdi Salam, yang mana masalah dalam perspektif Izzudin sama halnya dengan masalah dalam perspektif Syatibi, Izzudin juga menjelaskan bahwa masalah itu terbagi menjadi dua makna yaitu makna *haqiqi*, serta makna *majazi*, ia juga menjelaskan bahwa setiap larangan dan perintah dilakukan untuk mewujudkan tujuan syariatnya, tujuan dari syariat itu sendiri adalah meningkatkan manfaat dan menghilangkan bahaya atau *mudharat*, dalam penelitiannya ia juga mengkaji tentang *maqasid syariah*. Sehingga sama halnya dengan penelitian Imron, bahwa penelitian Johari ini secara spesifik membahas tentang masalah dalam perspektif Izzudin Ibn Abd Salam, sedangkan penelitian penulis ini membahas tentang pencapaian masalah yang dialami oleh para pedagang sebelum dan sesudah menerima bantuan pemberian lahan secara gratis dari pemerintah, maka dalam hal ini penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Johari.

Adapula penelitian yang ditulis oleh (Pusparini, 2015), dalam jurnalnya membahas tentang konsep kesejahteraan yang dilihat dari segi Ekonomi Islamnya, dan melihat kesejahteraan tersebut dengan perspektif *maqasid syariahnya*. Dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa penelitian tersebut juga menjelaskan tentang pemikiran dari Ghazali yang mana menjelaskan bahwa kesejahteraan itu juga menghubungkan antara individu dengan masyarakat, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dikemudian hari. Martini juga menjelaskan bahwa dalam pencapaian kesejahteraan manusia perlu memenuhi 5 aspek, yaitu: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, yang mana kelima aspek tersebut biasa disebut dengan Maqasid Syariah. Penelitian Martini berbeda dengan penelitian penulis, dalam penelitian penulis, yang penulis bahas adalah mengenai hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan pencapaian masalah atau kesejahteraan apabila pemberdayaan tersebut berhasil dilakukan. Sehingga penelitian penulis menghubungkan antara teori pemberdayaan dengan teori masalah, sedangkan pembahasan dalam penelitian Martini adalah tentang

konsep kesejahteraan dilihat dari aspek Maqasid Syariah, dengan begitu penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang Martini lakukan.

Jika melihat dari pencapaian masalah yang dialami oleh para pedagang, sebagian besar dari mereka mengalami peningkatan kesejahteraan, dan ada beberapa dari pedagang yang mana sebelum diberikan bantuan, mereka adalah kuli bangunan dan pedagang keliling yang mana penghasilannya kurang bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Namun setelah memperoleh bantuan berupa pemberian lahan dari pemerintah ini, maka terdapat peningkatan pendapatan yang signifikan, awalnya mereka yang tidak mempunyai usaha menjadi memiliki usaha, serta peningkatan wisatawan seiring berjalannya waktu menciptakan peningkatan pendapatan pula bagi masyarakat. Dan ada juga dari pemilik warung tersebut yang mempekerjakan tetangganya yang tidak memiliki pekerjaan untuk menjaga warung mereka, dikarenakan pemilik tersebut memiliki kewajiban atau tugas yang lebih penting, sehingga dari kejadian ini para pedagang juga membantu tetangganya untuk dapat memiliki pekerjaan.

Melihat dari penjelasan diatas, maka kesejahteraan dan masalah yang diperoleh tidak hanya untuk pemilik seorang, namun kesejahteraan yang diperoleh juga merupakan kesejahteraan sosial, dikarenakan satu pedagang membantu tetangganya dengan memberikan pekerjaan bagi mereka, sehingga pencapaian masalah dan peningkatan kesejahteraan juga dirasakan oleh para penjaga warung tersebut.

Pencapaian kesejahteraan ini terbukti dengan adanya pemenuhan kebutuhan hidup para pedagang yang semakin meningkat dibandingkan sebelumnya, tidak hanya sebelum diberikan lahan oleh pemerintah, namun setelah diberikan lahan pun mereka merasakan peningkatan pendapatan, hal ini dikarenakan wisatawan yang semakin meningkat disetiap waktunya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan masalah para pedagang dari sebelum diberikan bantuan berupa lahan gratis dengan sesudah diberikan bantuan lahan secara gratis. Yang mana peningkatan masalahnya dapat terbukti dengan para pedagang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka lebih baik dan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya pedagang

yang berjualan disana terdapat sepuluh orang, namun dikarenakan yang satu sibuk sebagai guru, sehingga jarang membuka warungnya, dan yang satu lagi istrinya habis melahirkan sehingga beliau cuti sementara untuk tidak berjualan. Adapun peningkatan pendapatan para pedagang sebelum dan sesudah adanya penyediaan lahan dari pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Bantuan Pemerintah

Nama	Rata-Rata Pendapatan Sebelum	Rata-Rata Pendapatan Sesudah
Warjiyem	$\leq$ Rp 500.000	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000
Saliyem	$\leq$ Rp 500.000	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000
Musinah	$\geq$ Rp 500.000	$\geq$ Rp 5.000.000
Lanjar	$\leq$ Rp 500.000	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000
Sudarwati	$\leq$ Rp 500.000	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000
Suwarni	$\leq$ Rp 500.000	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000
Saykem	$\geq$ Rp 500.000	$\geq$ Rp 5.000.000
Titi	$\leq$ Rp 500.000	$\geq$ Rp 5.000.000

Sumber: Data Primer (Diolah, 2018)

Tabel 4.5 Perbandingan Pendapatan Pedagang Setelah Memperoleh Bantuan Pemerintah dengan UMR Bantul

Nama	Pendapatan Sesudah Memperoleh Bantuan	UMR Bantul
-------------	--	-------------------

	Pemerintah	
Warjiyem	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000	Rp 1.527.150
Saliyem	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000	Rp 1.527.150
Musinah	$\geq$ Rp 5.000.000	Rp 1.527.150
Lanjar	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000	Rp 1.527.150
Sudarwati	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000	Rp 1.527.150
Suwarni	Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000	Rp 1.527.150
Saykem	$\geq$ Rp 5.000.000	Rp 1.527.150
Titi	$\geq$ Rp 5.000.000	Rp 1.527.150

Sumber: Data Primer (Diolah 2018)

Dengan peningkatan pendapatan baik yang dibandingkan dengan pendapatan sebelum memperoleh bantuan ataupun dengan UMR Bantul, maka pedagang dapat mencapai masalahnya, jika dilihat dalam segi *dharuriyyat*, maka dapat dibuktikan dengan para pedagang yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya, dan dari segi *hajiyyat* terbukti dengan pedagang yang awalnya belum memiliki motor bisa memiliki motor dan dapat dipergunakan sebagai transportasi sehari-hari, dan dari segi *tahsiniyyat* dapat dibuktikan dengan para pedagang yang awalnya memiliki handphone biasa, sekarang sudah dapat membeli *smartphone* yang baru dengan kualitas yang bagus. Dengan begitu indikator dari pencapaian masalah para pedagang dari segi *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* sudah tercapai. Selain dari segi *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*nya, jika dibandingkan dengan UMR, para pedagang juga memperoleh pencapaian masalahnya, hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang berada diatas UMR Bantul yang sudah ditetapkan, sehingga terdapat pencapaian masalah yang dialami oleh para pedagang di Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul tersebut.

Dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh pedagang pula, maka secara tidak langsung mereka sudah melewati tahapan kesejahteraan bagi suatu keluarga, yang mana awalnya mereka berada pada tahap keluarga pra sejahtera, kemudian menjadi keluarga sejahtera tahap I, dan semakin meningkat menjadi keluarga sejahtera tahap II, dan semakin meningkat lagi menjadi keluarga sejahtera tahap III dan akhirnya mereka sekarang berada ditahap keluarga sejahtera tahap III plus, hal ini terbukti dengan para pedagang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga baik yang bersifat dasar, sosial-psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta mereka juga sudah memberikan sumbangan yang nyata bagi masyarakat salah satu contohnya berupa membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga mereka yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dengan menggunakan metode wawancara, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah sudah melakukan perannya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul, namun masih ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan lebih lanjut, seperti pemantauan, pengelolaan, pelatihan, dan lain sebagainya secara berkelanjutan kepada para pedagang di Taman Buah Mangunan tersebut. Sedangkan indikator bahwa pemerintah telah melakukan pemberdayaan adalah dengan dilakukannya pengelolaan, pemantauan, pelatihan dan indikator yang lainnya secara berkelanjutan. Namun yang terjadi di Taman Buah Mangunan adalah pemerintah kurang berperan dari segi indikator yang disebutkan diatas, hal ini terjadi karena menurut pemerintah dengan adanya pemberian lahan untuk digunakan sebagai lahan untuk berjualan, pemerintah sudah melakukan pemberdayaan yang layak dan dengan lahan tersebut para pedagang akan terberdaya dengan sendirinya.
2. Pencapaian Mashlahat bagi masyarakat sekitar Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul sudah terpenuhi, namun sebenarnya peningkatan masalah yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para pedagang dikarenakan inisiatif dari mereka sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah, sehingga kemashlahatan yang terjadi lebih banyak dihasilkan oleh masyarakat dan bukan dari pemerintah. Namun jika melihat pada ilustrasi yang telah dijelaskan, sejatinya pemerintah sudah berkontribusi dalam pemberian modalnya, dan jika kembali kepada definisi dari

masalah itu sendiri, maka sejatinya kemashlahatan dari masyarakat khususnya para pedagang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan pula dengan pendapat para pedagang yang meningkat setelah memperoleh bantuan dari pemerintah, serta pendapatan para pedagang yang berada di atas UMR Bantul. Dikarenakan dengan semakin meningkatnya para wisatawan sehingga penghasilan para pedagang juga semakin meningkat, serta kebutuhan primer dari setiap keluarga semakin tercukupi dan semakin meningkat. Dengan begitu masalah serta kesejahteraan bagi para pedagang juga semakin meningkat disertai dengan peningkatan dari wisatawan yang berkunjung ke Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal agar penelitian ini dapat disempurnakan lagi oleh peneliti selanjutnya sehingga hasilnya lebih optimal, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul
Sebagai instansi pemerintah yang mengelola Taman Buah Mangunan, maka diharapkan adanya maksimalisasi dalam melakukan perannya untuk pemberdayaan ekonomi kepada para pedagang di Taman Buah Mangunan tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan dapat berupa pelatihan dan penggalan potensi bagi para pedagang. Serta adanya pemantauan serta pengelolaan secara berkelanjutan terhadap para pedagang Taman Buah Mangunan.
2. Pihak akademis Ekonomi Islam
Diharapkan bagi Fakultas Ilmu agama Islam khususnya Ekonomi Islam agar dapat mengkampanyekan agar pemerintah dalam melakukan perannya dengan maksimal, dan juga diharapkan agar Fakultas Ilmu Agama Islam Khususnya

Ekonomi Islam untuk senantiasa membantu masyarakat dalam mengapresiasi keinginan mereka kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, A. (2013). Maşlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi, 5, 87–96.
- Asy'arie, M. (1997). *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Lesfi.
- Basith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan (Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah)*. malang: UIN MALIKI PRESS.
- Bungin, B. (2003). *analisis data penelitian kualitatif*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chapra, U. (1999). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. jakarta: Gema Insani.
- Djazuli. (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. jakarta: kencana prenatal media grup.
- Eko, S. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Jaelani, dian iskandar. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam. *Eksyar*, 1(1), 018–034.
- Jindan, & Khalid, I. (1994). *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah(terjemahan)*. jakarta: rineka cipta.
- Johari. (2013). Konsep Maşlahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam. *Episteme*, 8, 69–88.
- Karsidi, R. (2001). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Mediator*, 2(1), 115–125.
- Kartasmita, G. (1995). pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. *Bestari*, 28–34.
- Ketut, A. (2005). Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas

- Lingkungan Pemukiman Kumuh di Provinsi Bali. *Permukiman Natak*, 3(1), 1–61.
- Kountur, R. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: PPM Sekolah Tinggi Manajemen.
- Kurnia, Widiastuti. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. (LABSA, Ed.). Yogyakarta.
- Kuswata, A. (1985). *Manajemen Pembangunan Desa*. Jakarta: Grafindo Utama.
- Munandar, A. (2008). Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Poelitik*, 4(1), 151–162.
- Nawawi, M. (2010). Konsep Masalah Perspektif Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. *Al-Ihkam*, 4, 19–36.
- Pusparini, M. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah), 1, 45–59.
- Rosyadi, I. (2013). Pemikiran Asy-Syatibi. *Profetika*, 14, 79–89.
- Sadat, A. (2013). Kedudukan Masalah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie. *Al-'adl*, 6(2), 29–43.
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH*, 1(2), 93–209.
- Walangitan, H. D., Langi, M. A., Agronomi, P. S., Studi, P., Kehutanan, I., Pertanian, F., ... Manado, R. (2015). Evaluasi efektivitas pengelolaan taman wisata alam batuputih dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. *EMBA*, 3(3), 660–671.
- Zuhri, S. (2009). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara beserta Jawabannya

A. Pengelola Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul

1. Kapanakah awal mula wisata ini berdiri?

Bu Sujiyatmi: Awal buka lahan tahun 2003, namun pertama dibuka sebagai tempat wisata adalah pada tahun 2014, dan Taman Buah Mangunan ini berada di bawah Dinas Kelautan, Pangan dan Perikanan. Awalnya hanya sebagai konservasi penanganan lahan kritis, namun seiring berjalannya waktu dijadikan sebagai tempat wisata.

2. Apakah ada pemantuan dari pemerintah pada wisata ini? Jika ada, berapa kali pemerintah m

elakukan pemantauan?

Bu Sujiyatmi: Dari pemerintah wisata ini setiap saat dipantau, karena pekerja disini merupakan pegawai negeri sipil, sehingga setiap saat dipantau.

3. Bagaimanakah perubahan kondisi dari sejak berdiri hingga sekarang dengan adanya bantuan dari pemerintah tersebut?
4. **Bu Sujiyatmi:** Terdapat perbedaan setelah adanya bantuan dari pemerintah, semakin berjalannya waktu, wisatawan semakin meningkat dan wisata Taman Buah Mangunan ini juga semakin ramai pengunjung.

B. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul

1. Bagaimanakah cara yang dilakukan Dinas Pertanian Bantul dalam memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Pak Ari dan Bu Yuni: Dalam memberdayakan perekonomian, yang mereka lakukan adalah dengan penggunaan lahan tersebut, dimana menurut mereka dengan adanya bantuan itu masyarakat akan terberdaya dengan sendirinya.

2. Apakah para pedagang yang berjualan disekitar Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul memperoleh pemberdayaan dari segi ekonomi? Jika Iya, apa sajakah pemberdayaan tersebut?

Pak Ari dan Bu Yuni: Yang mereka lakukan adalah dengan pemberian lahan untuk digunakan secara gratis tersebut, dengan begitu mereka akan terberdaya dengan sendirinya.

3. Apakah diadakan pelatihan bagi para pedagang agar dapat mengembangkan intelektual mereka? Apa sajakah contohnya?

Pak Ari dan Bu Yuni: Tidak Pernah.

4. Apakah strategi yang digunakan agar para pedagang tidak mengalami ketimpangan ekonomi?

Pak Ari dan Bu Yuni: Yang mereka lakukan sebatas pemberian lahan untuk digunakan saja. Dengan begitu masyarakat akan memberdayakan diri mereka sendiri.

C. Pedagang sekitar Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul

Bu Warjiyem

1. Apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para pedagang yang terdapat pada Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Warjiem: Tidak pernah, namun dengan pemberian lahan untuk berjualan ini, beliau jadi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar?

Bu Warjiyem: Jika dikhususkan untuk para pedagang, maka pelatihan tersebut belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Namun untuk lingkup desa, pelatihan ini sudah pernah dilakukan namun saat tahun 2008.

3. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat para pedagang berjualan?

Bu Warjiyem: Pemerintah belum pernah melakukan pelatihan tersebut, namun dikarenakan setiap dari pedagang adalah warga satu dusun, maka mereka tidak memerlukan pelatihan tersebut, karena mereka sudah mengenal satu sama lain dan sudah bisa beradaptasi, bahkan mereka juga saling tolong menolong apabila pedagang yang lain membutuhkan bantuan mereka. Walaupun ada sebagian pedagang yang berasal dari luar dusun, namun mereka dapat langsung beradaptasi dengan para pedagang yang lainnya.

4. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat menggali potensi masyarakat sehingga dapat berinovasi dalam membuka usahanya?

Bu Warjiyem: Untuk lingkup para pedagang, pemerintah belum pernah melakukan pelatihan tersebut, namun untuk lingkup desa sudah pernah diadakan pelatihan tersebut. Dan warga sekitarpun sudah faham dan biasanya mereka menitipkan usaha mereka seperti hasil karya dan lain sebagainya kepada para pedagang Taman Buah Mangunan.

5. Bagaimanakah sistem dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha dagang tersebut?

Bu Warjiyem: Tidak ada pengambilan keputusan dari pemerintah, sehingga dalam saat akan berjualan cukup mengajukan kepada pengelola saja.

6. Adakah batasan tertentu dalam perolehan keuntungan setiap harinya? Jika ada, kemanakah kelebihan dari keuntungan tersebut diberikan?

Bu Warjiyem: Tidak ada batasan dalam perolehan keuntungan, semuanya menjadi milik para pedagang tersebut. Bahkan pemerintah juga memberikan secara gratis air dan listrik sebagai fasilitas mereka untuk berjualan.

7. Bagaimanakah perkembangan setelah adanya bantuan dari pemerintah dan sebelum adanya bantuan dari pemerintah?

Bu Warjiyem: Setelah adanya bantuan dari pemerintah, perekonomian keluarga semain meningkat, dan beliau bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya, serta beliau juga mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

8. Adakah peraturan/regulasi yang mengatur tentang para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul? Jika ada, bagaimana anda menyikapi peraturan tersebut?

Bu Warjiyem: Tidak ada peraturan yang dikhususkan oleh pemerintah kepada para pedagang, hanya saja mereka harus tetap menjaga kebersihan wilayah warung mereka, maka dari itu para pedagang akhirnya berinisiatif untuk menyewa petugas kebersihan untuk membersihkan wilayah warung mereka, namun disamping itu mereka juga harus menjaga kebersihan wilayah mereka masing-masing, dan setiap minggu diadakan bersih-bersih secara bersama-sama.

9. Apakah anda mencatat hasil pendapatan dan hutang?

Bu Warjiyem: Tidak, beliau tidak mencatat hasil pendapatan dan hutang setiap berjualan.

10. Bagaimanakah hubungan sosial antar para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Warjiyem: Hubungan antara satu pedagang dengan pedagang yang lain sangatlah baik, bahkan mereka saling tolong menolong jika pedagang yang lain membutuhkan bantuannya.

11. Apakah pekerjaan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Warjiyem: Ibu Rumah Tangga

12. Berapakah penghasilan per bulan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Warjiyem: $\leq$ Rp 500.000

13. Berapakah penghasilan per bulan setelah menjadi pedagang di Taman Buah Mangunan

Bu Warjiyem: Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000

Bu Saykem

1. Apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para pedagang yang terdapat pada Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Saykem: Belum pernah

2. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar?

Bu Saykem: Belum Pernah, namun dalam lingkup desa sudah pernah diadakan, tetapi itu pada saat bencana gempa 2008.

3. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat para pedagang berjualan?

Bu Saykem: Belum pernah, namun dikarenakan para pedagang disini adalah sesama tetangga dan masih satu dusun sehingga sudah saling mengenal.

4. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat menggali potensi masyarakat sehingga dapat berinovasi dalam membuka usahanya?

Bu Saykem: Belum pernah jika dikhususkan kepada para pedagang, namun untuk lingkup desa sudah pernah diadakan.

5. Bagaimanakah sistem dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha dagang tersebut?

Bu Saykem: Pemerintah tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan para pedagang saat akan berdagang.

6. Adakah batasan tertentu dalam perolehan keuntungan setiap harinya? Jika ada, kemanakah kelebihan dari keuntungan tersebut diberikan?

Bu Saykem: Tidak ada, semuanya menjadi milik pedagang tersebut.

7. Bagaimanakah perkembangan setelah adanya bantuan dari pemerintah dan sebelum adanya bantuan dari pemerintah?

Bu Saykem: Terdapat peningkatan dalam perolehan keuntungan dan penghasilan, sehingga beliau dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya lebih baik dibandingkan saat belum mendapat bantuan dari pemerintah.

8. Adakah peraturan/regulasi yang mengatur tentang para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul? Jika ada, bagaimana anda menyikapi peraturan tersebut?

Bu Saykem: Tidak ada, yang jelas tetap menjaga kebersihan saja.

9. Apakah anda mencatat hasil pendapatan dan hutang?

Bu Saykem: Tidak pernah.

10. Bagaimanakah hubungan sosial antar para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Saykem: Sangat baik, bahkan setiap pedagang saling tolong menolong.

11. Apakah pekerjaan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Saykem: Kerja di Meubel.

12. Berapakah penghasilan per bulan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Saykem: $\geq$ Rp 500.000 tetapi sekarang sudah bangkrut.

13. Berapakah penghasilan per bulan setelah menjadi pedagang di Taman Buah Mangunan

Bu Saykem: $\geq$ Rp 5.000.000

Bu Titi

1. Apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para pedagang yang terdapat pada Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Titi: Pemerintah tidak pernah memberikan kebutuhan dasar apapun, yang pemerintah berikan yaitu lahan secara gratis ini.

2. Apakah para pedagang disini sudah memperoleh pelatihan untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar?

Bu Titi: Belum pernah jika untuk para pedagang di Taman Buah Mangunan ini, namun untuk lingkup desa sudah pernah tetapi pada tahun 2008.

3. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat para pedagang berjualan?

Bu Titi: Belum pernah, tapi sebenarnya pelatihan ini tidak terlalu dibutuhkan, dikarenakan mereka sudah mengenal satu sama lain sebagai, karena mereka adalah warga satu dusun.

4. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat menggali potensi masyarakat sehingga dapat berinovasi dalam membuka usahanya?

Bu Titi: Belum pernah jika dikhususkan untuk para pedagang, tetapi pelatihan seperti itu pernah diadakan di desa.

5. Bagaimanakah sistem dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha dagang tersebut?

Bu Titi: Pemerintah tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan apabila mereka akan berdagang.

6. Adakah batasan tertentu dalam perolehan keuntungan setiap harinya? Jika ada, kemanakah kelebihan dari keuntungan tersebut diberikan?

Bu Titi: Tidak ada, seluruh penghasilan menjadi milik warga tanpa ada bagi hasil kepada pemerintah, bahkan pemerintah memberikan listrik dan air secara gratis sebagai fasilitas bagi para pedagang.

7. Bagaimanakah perkembangan setelah adanya bantuan dari pemerintah dan sebelum adanya bantuan dari pemerintah?

Bu Titi: Perkembangannya sangat terasa, apalagi beliau ini awalnya hanya berjualan keliling menggunakan motor, namun setelah memperoleh bantuan dari pemerintah, maka penghasilan beliau pun semakin meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik dibanding saat masih berjualan keliling menggunakan sepeda motor.

8. Adakah peraturan/regulasi yang mengatur tentang para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul? Jika ada, bagaimana anda menyikapi peraturan tersebut?

Bu Titi: Tidak ada, tetapi para pedagang harus tetap menjaga kebersihan warung mereka.

9. Apakah anda mencatat hasil pendapatan dan hutang?

Bu Titi: Tidak pernah.

10. Bagaimanakah hubungan sosial antar para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Titi: Sangat Baik, bahkan antar pedagang saling tolong menolong.

11. Apakah pekerjaan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Titi: Berdagang Cilok di sekolah.

12. Berapakah penghasilan per bulan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Titi: $\leq$ Rp 500.000

13. Berapakah penghasilan per bulan setelah menjadi pedagang di Taman Buah Mangunan

Bu Titi: $\geq$ Rp 5.000.000

Bu Musinah

1. Apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para pedagang yang terdapat pada Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Musinah: Belum pernah.

2. Apakah para pedagang disini sudah memperoleh pelatihan untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar?

Bu Musinah: Belum Pernah jika dikhususkan kepada para pedagang, namun jika di desa sudah pernah diadakan yaitu saat bencana gempa tahun 2008.

3. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat para pedagang berjualan?

Bu Musinah: Pemerintah belum pernah memberikan pelatihan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan, namun menurut beliau hal itu tidak perlu dilakukan karena antar pedagang sudah saling mengenal.

4. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat menggali potensi masyarakat sehingga dapat berinovasi dalam membuka usahanya?

Bu Musinah: Belum pernah dilakukan jika dilingkup para pedagang saja, namun jika dilingkup desa sudah pernah dilakukan.

5. Bagaimanakah sistem dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha dagang tersebut?

Bu Musinah: Pemerintah tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan untuk para pedagang tersebut ketika akan membuka warungnya.

6. Adakah batasan tertentu dalam perolehan keuntungan setiap harinya? Jika ada, kemanakah kelebihan dari keuntungan tersebut diberikan?

Bu Musinah: Tidak ada, semua penghasilan menjadi milik para pedagang.

7. Bagaimanakah perkembangan setelah adanya bantuan dari pemerintah dan sebelum adanya bantuan dari pemerintah?

Bu Musinah: Sebelum memperoleh bantuan dari pemerintah, beliau adalah seorang kuli bangunan, kemudian setelah memperoleh bantuan dari pemerintah akhirnya penghasilan beliau meningkat dibanding saat masih menjadi kuli bangunan, dan dengan penghasilan yang meningkat tersebut beliau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan semakin berjalannya waktu, wisatawan semakin banyak sehingga penghasilanpun juga semakin meningkat. Sehingga bagi beliau sangat terasa sekali perbedaannya.

8. Adakah peraturan/regulasi yang mengatur tentang para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul? Jika ada, bagaimana anda menyikapi peraturan tersebut?

Bu Musinah: Tidak ada, yang terpenting mereka harus tetap menjaga kebersihan daerah sekitar warung.

9. Apakah anda mencatat hasil pendapatan dan hutang?

Bu Musinah: Tidak pernah.

10. Bagaimanakah hubungan sosial antar para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Musinah: Sangat baik dan saling tolong menolong antar pedagang, apabila pedagang satu kehabisan bahan dia bisa mengambil dari pedagang yang lainnya. Sehingga mereka terbiasa saling membantu satu sama lain.

11. Apakah pekerjaan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Musinah: Kerja di Pabrik Konveksi

12. Berapakah penghasilan per bulan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Musinah: $\geq$ Rp 500.000

13. Berapakah penghasilan per bulan setelah menjadi pedagang di Taman Buah Mangunan

Bu Musinah: $\geq$ Rp 5.000.000

Bu Suwarni

1. Apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para pedagang yang terdapat pada Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Suwarni: Belum Pernah.

2. Apakah para pedagang disini sudah memperoleh pelatihan untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar?

Bu Suwarni: Jika dikhususkan untuk para pedagang belum pernah, namun dilingkup desa pelatihan ini pernah dilakukan saat ada bencana gempa pada tahun 2008.

3. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat para pedagang berjualan?

Bu Suwarni: Belum pernah, namun hal ini tidak perlu untuk dilakukan karena mereka sudah saling kenal satu sama lain, karena mereka satu desa dan saling bertetangga.

4. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat menggali potensi masyarakat sehingga dapat berinovasi dalam membuka usahanya?

Bu Suwarni: Belum pernah jika dikhususkan untuk para pedagang, namun jika untuk lingkup desa sudah pernah dilakukan, bahkan jika ada pelatihan di desa tersebut beliau akan meminta tolong orang lain untuk menjaga warungnya dan beliau pulang ke desa untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan hasil dari pelatihan di desa tersebut banyak yang dititipkan kepada para pedagang di Taman Buah Mangunan, seperti tiwul, wedang uwuh, jamu herbal, mainan ketapel, dan lain sebagainya.

5. Bagaimanakah sistem dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha dagang tersebut?

Bu Suwarni: Ketika beliau ingin berdagang disana, beliau tidak perlu meminta keputusan kepada pemerintah.

6. Adakah batasan tertentu dalam perolehan keuntungan setiap harinya? Jika ada, kemanakah kelebihan dari keuntungan tersebut diberikan?

Bu Suwarni: Tidak ada, seluruh penghasilan yang diperoleh oleh para pedagang menjadi milik para pedagang seluruhnya.

7. Bagaimanakah perkembangan setelah adanya bantuan dari pemerintah dan sebelum adanya bantuan dari pemerintah?

Bu Suwarni: Sangat berbeda, menurut beliau dengan adanya bantuan dari pemerintah ini, beliau dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan penghasilan untuk keluarga menjadi lebih banyak, sehingga hidup mereka lebih terjamin, dengan adanya bantuan dari pemerintah ini sangat membantu para pedagang, sehingga para pedagang dapat meningkatkan penghasilan mereka. Di tambah lagi wisatawan yang semakin banyak yang membuat penghasilan para pedagang semakin bertambah pula setiap waktunya.

8. Adakah peraturan/regulasi yang mengatur tentang para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul? Jika ada, bagaimana anda menyikapi peraturan tersebut?

Bu Suwarni: Tidak ada. Yang terpenting adalah tetap menjaga kebersihan di masing-masing warung. Sehingga para pedagangpun membuat inisiatif untuk menuewa petugas kebersihan untuk membantu mereka dalam

menjaga kebersihan sekitar warung para pedagang Taman Buah Mangunan tersebut.

9. Apakah anda mencatat hasil pendapatan dan hutang?

Bu Suwarni: Tidak pernah, hal ini disebabkan karena ini adalah usaha sendiri, dan barang-barang yang dijual pun tidak pasti, terkadang hasil kebun yang dimiliki pedagang juga ikut dijual disana seperti pisang, dan lain sebagainya. Sehingga bagi beliau sangat sulit jika harus melakukan pembukuan.

10. Bagaimanakah hubungan sosial antar para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Suwarni: Sangat baik, setiap pedagang saling membantu satu sama lain, ketika pedagang satu pergi, maka mereka bisa menitipkannya kepada pedagang yang lain untuk menjaga warungnya sebentar.

11. Apakah pekerjaan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Suwarni: Buruh Tani

12. Berapakah penghasilan per bulan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Suwarni: $\leq$ Rp 500.000

13. Berapakah penghasilan per bulan setelah menjadi pedagang di Taman Buah Mangunan

Bu Suwarni: Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000

Bu Sudarwati

1. Apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para pedagang yang terdapat pada Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Sudarwati: Belum pernah.

2. Apakah para pedagang disini sudah memperoleh pelatihan untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar?

Bu Sudarwati: Jika untuk para pedagang saja belum pernah, tetapi jika berada dilingkup desa sudah pernah yaitu ada tahun 2008 saat terjadinya bencana gempa bumi.

3. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat para pedagang berjualan?

Bu Sudarwati: Belum pernah, tetapi menurut beliau bahwa hal itu tidak terlalu diperlukan, karena mereka sudah saling mengenal sebagai tetangga.

4. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat menggali potensi masyarakat sehingga dapat berinovasi dalam membuka usahanya?

Bu Sudarwati: Untuk pedagang secara khususnya belum pernah, namun jika pelatihan diadakan di desa sudah pernah ada.

5. Bagaimanakah sistem dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha dagang tersebut?

Bu Sudarwati: Dalam usaha untuk berdagang, pemerintah tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan untuk para pedagang berjualan.

6. Adakah batasan tertentu dalam perolehan keuntungan setiap harinya? Jika ada, kemanakah kelebihan dari keuntungan tersebut diberikan?

Bu Sudarwati: Tidak ada, seluruh penghasilan menjadi milik para pedagang.

7. Bagaimanakah perkembangan setelah adanya bantuan dari pemerintah dan sebelum adanya bantuan dari pemerintah?

Bu Sudarwati: Sangat berbeda dan semakin meningkat setiap waktunya, dikarenakan wisatawan yang semakin ramai berdatangan, sehingga membuat penghasilan beliau meningkat dan dengan penghasilan yang meningkat itu beliau dapat meningkatkan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

8. Adakah peraturan/regulasi yang mengatur tentang para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul? Jika ada, bagaimana anda menyikapi peraturan tersebut?

Bu Sudarwati: Tidak ada, yang penting beliau tetap harus menjaga kebersihan sekitar warung mereka.

9. Apakah anda mencatat hasil pendapatan dan hutang?

Bu Sudarwati: Tidak pernah, karena ini adalah warung milik sendiri, sehingga tidak pernah mencatat pembukuan.

10. Bagaimanakah hubungan sosial antar para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Sudarwati: Sangat Baik, antar pedagang saling tolong menolong apabila membutuhkan bantuan.

11. Apakah pekerjaan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Sudarwati: Buruh Tani

12. Berapakah penghasilan per bulan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Sudarwati: $\leq$ Rp 500.000

13. Berapakah penghasilan per bulan setelah menjadi pedagang di Taman Buah Mangunan

Bu Sudarwati: Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000

Bu Saliyem

1. Apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para pedagang yang terdapat pada Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Saliyem: Belum Pernah

2. Apakah para pedagang disini sudah memperoleh pelatihan untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar?

Bu Saliyem: Belum pernah jika di lingkup para pedagang Taman Buah Mangunan, namun jika lingkup desa sudah pernah dilakukan saat ada gempa tahun 2008.

3. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat para pedagang berjualan?

Bu Saliyem: Belum pernah, tetapi hal itu tidak terlalu diperlukan karena mereka sudah saling mengenal sebagai tetangga di desanya.

4. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat menggali potensi masyarakat sehingga dapat berinovasi dalam membuka usahanya?

Bu Saliyem: Jika dikhususkan untuk para pedagang belum pernah, tetapi jika pelatihan yang dilakukan di desa sudah pernah.

5. Bagaimanakah sistem dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha dagang tersebut?

Bu Saliyem: Tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, saat para pedagang akan membuka warung tersebut tidak memerlukan keputusan dari pemerintah.

6. Adakah batasan tertentu dalam perolehan keuntungan setiap harinya? Jika ada, kemanakah kelebihan dari keuntungan tersebut diberikan?

Bu Saliyem: Tidak ada.

7. Bagaimanakah perkembangan setelah adanya bantuan dari pemerintah dan sebelum adanya bantuan dari pemerintah?

Bu Saliyem: Semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga penghasilanpun juga semakin meningkat dari waktu ke waktu, walaupun beliau hanya sebagai penjaga warung milik Pak Ari saja, tetapi beliau dapat merasakan perbedaannya setelah memperoleh bantuan dari pemerintah, sekarang kebutuhan hidup beliau sudah lebih bisa terpenuhi dibandingkan sebelumnya.

8. Adakah peraturan/regulasi yang mengatur tentang para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul? Jika ada, bagaimana anda menyikapi peraturan tersebut?

Bu Saliyem: Tidak ada. Yang penting mereka tetpa menjaga kebersihan warung dan sekitarnya saja.

9. Apakah anda mencatat hasil pendapatan dan hutang?

Bu Saliyem: Tidak pernah.

10. Bagaimanakah hubungan sosial antar para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Saliyem: Sangat Baik, bahkan antar pedagang saling tolong menolong dan bantu membantu ketika mereka membutuhkan.

11. Apakah pekerjaan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Saliyem: Kuli Bangunan

12. Berapakah penghasilan per bulan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Saliyem: $\geq$ Rp 500.000

13. Berapakah penghasilan per bulan setelah menjadi pedagang di Taman Buah Mangunan

Bu Saliyem: Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000

Bu Lanjar

1. Apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para pedagang yang terdapat pada Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Lanjar: Belum Pernah.

2. Apakah para pedagang disini sudah memperoleh pelatihan untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar?

Bu Lanjar: Jika dalam lingkup para pedagang saja belum pernah, namun jika dilakukan di desa sudah pernah pada tahun 2008 saat terjadi bencana gempa.

3. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat para pedagang berjualan?

Bu Lanjar: Belum pernah, tetapi hal itu tidak terlalu diperlukan karena mereka adalah warga satu dusun sehingga saling mengenal satu sama lain.

4. Apakah pemerintah sudah memberikan pelatihan untuk dapat menggali potensi masyarakat sehingga dapat berinovasi dalam membuka usahanya?

Bu Lanjar: Jika dikhususkan untuk para pedagang belum pernah, namun jika dilakukan di desa sudah pernah.

5. Bagaimanakah sistem dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha dagang tersebut?

Bu Lanjar: Ketika para pedagang akan membuka warung tersebut tidak membutuhkan keputusan dari pemerintah.

6. Adakah batasan tertentu dalam perolehan keuntungan setiap harinya? Jika ada, kemanakah kelebihan dari keuntungan tersebut diberikan?

Bu Lanjar: Tidak ada batasan, seluruh penghasilan menjadi milik para pedagang.

7. Bagaimanakah perkembangan setelah adanya bantuan dari pemerintah dan sebelum adanya bantuan dari pemerintah?

Bu Lanjar: Sangat berbeda, dan semakin banyaknya wisatawan maka penghasilan semakin meningkat, namun jika dibandingkan dengan wisata saat masih sedikit mungkin penghasilannya akan lebih banyak. Namun dengan peningkatan wisatawan ini beliau juga sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun beliau hanya menjaga warung dari Bu Iim, namun beliau merasakan perbedaannya setelah pemerintah memberikan bantuan tersebut.

8. Adakah peraturan/regulasi yang mengatur tentang para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul? Jika ada, bagaimana anda menyikapi peraturan tersebut?

Bu Lanjar: Tidak ada.

9. Apakah anda mencatat hasil pendapatan dan hutang?

Bu Lanjar: Tidak pernah.

10. Bagaimanakah hubungan sosial antar para pedagang di Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Bu Lanjar: Sangat Baik dan saling tolong menolong.

11. Apakah pekerjaan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Lanjar: Ibu Rumah Tangga

12. Berapakah penghasilan per bulan sebelum berdagang di Taman Buah Mangunan?

Bu Lanjar: ≤ Rp 500.000

13. Berapakah penghasilan per bulan setelah menjadi pedagang di Taman Buah Mangunan

Bu Lanjar: Antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000

D. Tokoh Masyarakat

Pak Suyadi selaku pak dusun dan ketua komunitas para pedagang

1. Bagaimanakah dampak dari adanya bantuan dari pemerintah?

Pak Suyadi: Dampaknya sangat positif, karena dengan adanya bantuan tersebut akhirnya mereka dapat memberdayakan seluruh masyarakat, dan tidak terbatas pada para pedagang saja, melainkan seluruh warga Mangunan. Sehingga penghasilan akan terbagi sama rata.

2. Bagaimanakah pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul?

Pa Suyadi: Dengan memberikan pemberian lahan tersebut, namun pemerintah masih sangat lambat dalam memberdayakan perekonomian masyarakat, yang lebih banyak mengembangkan perekonomian dan mengembangkan inovasi adalah dari masyarakat sendiri, bahkan untuk bantuan dana pun pemerintah belum memberikan. Sehingga warga membangun wisata menggunakan barang-barang seadanya yang bisa di daur ulang, kemudian mengumpulkan dana hanya dari pembayaran parkir saja, selebihnya tidak ada pembayaran lagi karena hal ini akan termasuk dalam pemungutan liar.

3. Adakah peningkatan dalam pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat sekitar Taman Wisata Buah Mangunan Imogiri Bantul khususnya para pedagang setelah adanya pengembangan dari pemerintah?

Pak Suyadi: Sangat ada, dengan adanya bantuan tersebut para pedagang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik dari sebelumnya, sehingga para pedagang merasakan semakin sejahtera hidupnya.

Foto-Foto Saat Wawancara



